

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN TERHADAP KEMASLAHATAN
MASYARAKAT (KUALITAS PENDIDIKAN)
Studi Di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat
Sumatera Utara**



Disusun Oleh :

**Suci Lailatul Sifa
NIM. 190602020**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M /1444 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suci Lailatul Sifa
NIM : 190602020
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Suci Lailatul Sifa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

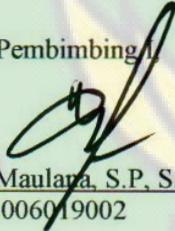
**Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Di
Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara**

Diajukan Oleh:

Suci Lailatul Sifa
NIM. 190602020


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan format telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



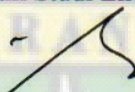
Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., ME
NIDN. 2006019002

Pembimbing II,



Seri Murni, SE, M.Si.Ak
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP.197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara

Suci Lailatul Sifa
NIM. 190602020

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 April 2023 M
20 Ramadan 1444 H

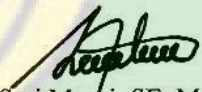
Banda Aceh
Dewan Penguji siding Skripsi

Ketua,



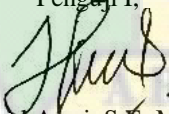
Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., ME
NIDN. 7006019002

Sekretaris,



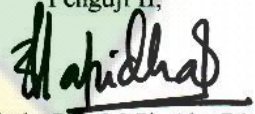
Seri Murni, SE, M.Si. Ak
NIP. 197210112014112001

Penguji I,



Khairul Amri, S.E., M.Si
NIDN. 0106077507

Penguji II,



Hafidhah, S.E., M.Si, Ak. CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furdani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Suci Lailatul Sifa
NIM : 190602020
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602020@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalihkan media formatkan, mengelola, mendominasi, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Maret 2023

Mengetahui,

Penulis

Suci Lailatul Sifa
NIM: 190602020

Pembimbing I

Hafizh Maulana, S.P. S.H.I. ME
NIDN. 2006019002

Pembimbing II

Seri Murni, SE, M.Si. Ak
NIP. 197210112014112001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir" (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286).

"Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha" (penulis).

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tua tercinta, dan keluarga besar tersayang yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.
- Semua dosen/guru dan fakultas/kampus yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
- Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara**" dengan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad Saw yang telah membawa risalah Islam sebagai tuntunan hidup yang sempurna untuk seluruh manusia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Alhamdulillah skripsi ini telah diselesaikan, tentunya hal ini tidak terlepas dari bantuan dukungan, arahan dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan dari penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku dekan Fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh

2. Bapak Dr. Fithriady, Lc, MA selaku wakil dekan I, Dr. Israk Ahmadsyah B, Ec, M, Ec, M, Sc selaku wakil dekan II dan Dr. Analiansyah, M.A selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Hafiizh Maulana, S.P, S.HI, ME selaku ketua laboratorium dan Mursalmina, M.E selaku dosen perwakilan program Studi Ekonomi Syariah Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Hafiizh Maulana, S.P, S.HI, ME selaku dosen pembimbing I dan ibu Seri Murni, SE, M.Si. Ak selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan pemikiran, waktu serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
5. Ibu Rina Desiana, M.E selaku dosen penasihat akademik, beserta dosen - dosen dan para staff fakultas ekonomi dan bisnis Islam, khususnya dosen -dosen program studi ekonomi syariah yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran perkuliahan.
6. Teristimewa kepada orang tua, kakak dan Abang yang paling saya cintai dan sayangi. Ayahanda Rahmat dan ibunda Halimah yang tiada hentinya mendoakan kesuksesan saya, kakak Khairul Bariah S.Pd.I serta Abang M. Zulfan

Rahadi yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menjalankan perkuliahan.

7. Teman-teman seperjuangan yakni mahasiswa S1 ekonomi syariah leting 2019 sebagai sumber kebahagiaan penulis selama menjalani perkuliahan di kampus.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak -pihak yang membutuhkan. Amiin

Banda Aceh, 21 Maret 2023
Penulis,

Suci Lailatul Sifa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	qāla
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qīla
يَقُولُ	:	yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

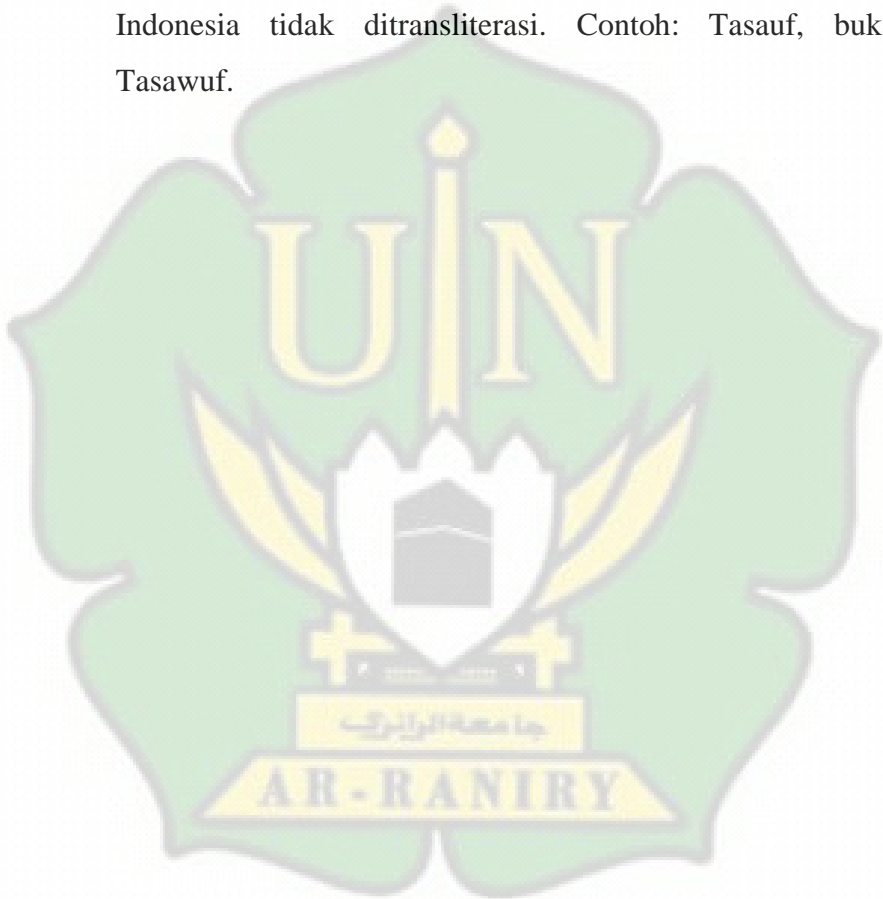
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	:	Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	:	Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Suci Lailatul Sifa
NIM : 190602020
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan) Studi Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara
Pembimbing I : Hafiizh Maulana, S.P., S.HI, ME
Pembimbing II : Seri Murni, SE., M.Si.Ak

Dalam Islam, tugas negara tidak hanya menyediakan pelatihan dan pembekalan keterampilan saja, akan tetapi tugas negara adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan baik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan anak, dan kualitas hidup masyarakat. Disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antara pendamping PKH dengan penunjang program, hak dan kewajiban para KPM PKH, serta belum optimalnya sosialisasi oleh pendamping PKH tentang pentingnya pendidikan formal bagi anak usia sekolah. Program keluarga harapan adalah salah satu program dari pemerintahan dalam pengawasan Bappenas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepuasan, pelayanan, dan kemanfaatan layanan bantuan sosial program keluarga harapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dari penelitian ini sebanyak 175 orang dan sampel sebanyak 65 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Secara parsial variabel kepuasan dan program layanan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan, sedangkan kemanfaatan layanan berpengaruh signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan. b) Secara simultan variabel kepuasan, program layanan dan kemanfaatan layanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan dengan nilai $P\text{-Value} = 0,000 < \alpha 0,05$. Berdasarkan uji R^2 pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 33,9%, sedangkan sisanya 66,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: *Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemaslahatan Masyarakat, Regresi Linear Berganda.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SIDANG	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBARAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	17
2.1.1 Bantuan Sosial	17
2.1.2 Dasar Hukum Bantuan Sosial.....	19
2.1.3 Program Keluarga Harapan	21
2.1.4 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan.....	22
2.1.5 Tujuan dan Sasaran Bansos Keluarga Harapan	24
2.1.6 Hak dan Kewajiban Program Keluarga Harapan.....	25
2.1.7 Besaran dan Mekanisme Bansos Keluarga Harapan.....	27
2.1.8 Alur Pelaksanaan PKH.....	30
2.2 Indikator Bantuan Sosial PKH	37
2.2.1 Kepuasan Layanan Bantuan Sosial PKH.....	37

2.2.2	Program Layanan Bantuan Sosial PKH.....	39
2.2.3	Kemanfaatan Layanan Publik Bansos PKH.....	43
2.3	Kemaslahatan Masyarakat.....	43
2.3.1	Pengertian Kemaslahatan Masyarakat.....	43
2.3.2	Macam-Macam Kemaslahatan Masyarakat.....	46
2.3.3	Indikator Kemaslahatan Masyarakat.....	47
2.3.4	Kualitas Pendidikan Dalam Islam.....	51
2.4	Penelitian Terkait.....	55
2.5	Kerangka Berpikir.....	62
2.5.1	Keterkaitan Kepuasan Layanan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat.....	62
2.5.2	Keterkaitan Program Layanan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat.....	65
2.5.3	Keterkaitan Kemanfaatan Layanan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat.....	65
2.6	Hipotesis Penelitian.....	67
BAB III METODE PENELITIAN.....		69
3.1	Desain Penelitian.....	69
3.2	Populasi dan Sampel.....	70
3.3	Sumber Data.....	71
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	71
3.5	Uji Reliabilitas dan Uji Validitas.....	72
3.5.1	Uji Reliabilitas.....	72
3.5.2	Uji Validitas.....	73
3.6	Definisi dan Operasional variabel.....	75
3.7	Uji Asumsi Klasik.....	76
3.7.1	Multikolinearitas.....	76
3.7.2	Uji Normalitas.....	76
3.7.3	Uji Heteroskedastisitas.....	77
3.8	Metode Analisis Data.....	77
3.9	Uji Hipotesis.....	78
3.9.1	Uji T.....	78
3.9.2	Uji Statistik F (Uji Simultan).....	78
3.9.3	Koefisiensi Determinasi (R^2).....	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		80
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	80

4.2	Gambaran Responden Penelitian.....	80
4.2.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
4.2.2	Responden Berdasarkan Usia	81
4.2.3	Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	82
4.2.4	Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan.	83
4.3	Statistik Deskriptif.....	84
4.4	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	86
4.4.1	Uji Reliabilitas.....	86
4.4.2	Uji Validitas.....	87
4.5	Uji Asumsi Klasik	90
4.5.1	Uji Multikolinearitas.....	90
4.5.2	Uji Normalitas	90
4.5.3	Uji Heteroskedastisitas	91
4.6	Hasil Analisis Regresi	92
4.7	Uji Hipotesis	94
4.7.1	Uji T.....	94
4.7.2	Uji F (Simultan).....	96
4.7.3	Koefisiensi Determinasi(R^2).....	97
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian.....	98
4.8.1	Pengaruh Kepuasan Layanan PKH Terhadap Kemaslahatan Masyarakat	98
4.8.2	Pengaruh Program Layanan PKH Terhadap Kemaslahatan Masyarakat	100
4.8.3	Pengaruh Kemanfaatan Layanan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat.....	101
4.8.4	Pengaruh Bantuan Sosial PKH Dalam Kemaslahatan Masyarakat.....	102
BAB V	PENUTUP	107
5.1	Kesimpulan.....	107
5.2	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110	
Lampiran Kuesioner	115	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penduduk Miskin Di Sumatera Utara	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3.1	Operasional Variabel	73
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif	85
Tabel 4.6	Uji Reliabilitas	87
Tabel 4.7	Uji Validitas Variabel Kepuasan Layanan	88
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Program Layanan Publik ...	88
Tabel 4.9	Uji Validitas Variabel Kemanfaatan Layanan	89
Tabel 4.10	Uji Validitas Variabel Kualitas Pendidikan.....	89
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinearitas	90
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas	91
Tabel 4.13	Hasil Uji Heteroskedastisitas	92
Tabel 4.14	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	93
Tabel 4.15	Hasil Uji T (Parsial).....	95
Tabel 4.16	Hasil Uji F (Simultan)	96
Tabel 4.17	Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	97

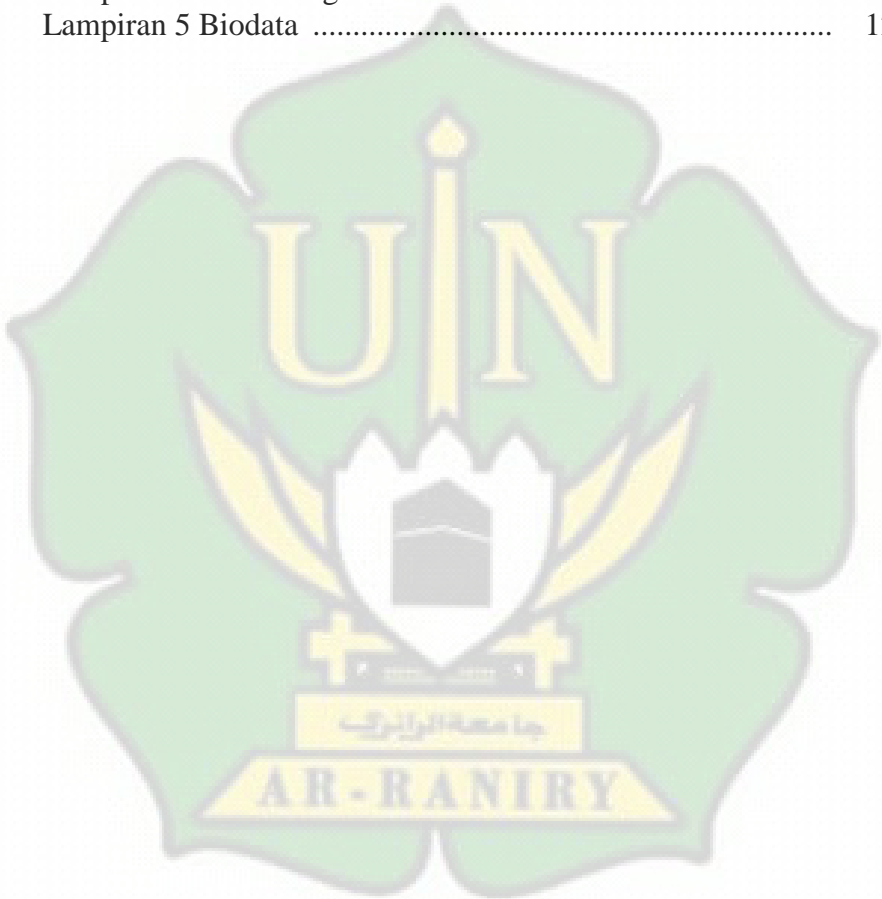
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penduduk Yang Berpendidikan Di Sumatera Utara Tahun 2021.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	66
Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia.....	82
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	83
Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Pendapatan.....	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	115
Lampiran 2 Tabulasi Data Responden.....	118
Lampiran 3 Data Responden	121
Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data	123
Lampiran 5 Biodata	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, tugas negara tidak hanya menyediakan pelatihan dan pembekalan keterampilan. Tetapi, tugas negara adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan baik. Jika masyarakat menganggur, negara harus memberikan pelatihan keterampilan, memberikan modal yang cukup dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Fungsi negara bukan hanya sebagai regulator dan fasilitator, melainkan melayani kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, pendidikan, papan, kesehatan dan keamanan secara gratis kepada rakyatnya secara optimal, serta negara harus memastikan bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran, yaitu dengan melakukan pengawasan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi (Jannah, 2022).

Islam mengajarkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang cukup berat. Oleh sebab itu, agar manusia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, diperlukan ilmu pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dalam fungsinya, pendidikan dapat mengantarkan umat manusia menuju kemaslahatan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat (Jannah, 2022).

Kemiskinan tidak bisa dihindari dan terjadi hampir di setiap negara. Masalah ini sudah ada sejak lama dan menjadi kenyataan. Dalam ajaran Islam, masalah kemiskinan biasanya merupakan akibat dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu. Menurut hukum Islam, ada tiga kebutuhan dasar: sandang, pangan, dan papan. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi. Tingkat kesejahteraan yang rendah menunjukkan tingkat produktivitas yang rendah. Kinerja yang buruk menunjukkan penggunaan sumber daya yang kurang optimal. Oleh karena itu, untuk menimalisir angka kemiskinan perlu adanya kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah (Umi Kalsum, 2019).

Tingginya kasus kemiskinan menandakan bahwa kehidupan masyarakat yang masih kurang dari segi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga dapat mencerminkan suatu tingkat kesejahteraan, dimana semakin tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan semakin rendah pula tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Dewasa ini masih banyak dijumpai masyarakat yang memiliki standar kehidupan yang kurang layak dan belum tersentuh pada kategori sejahtera. Padahal salah satu tujuan dan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia adalah kesejahteraan. Namun, fakta sosial yang ada menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat masih menjadi problematika yang masih berkembang sampai sekarang ini. Kesejahteraan selain mendorong kesamaan sosial dalam masyarakat dan mengurangi

kesenjangan sosial juga akan menurunkan tingkat kemiskinan sebagai implikasi secara langsung serta yang paling penting adalah terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat (Nurma Mustika, Nurhadji Nugraha, 2019).

Melihat fenomena permasalahan yang terjadi pemerintah dipandang perlu untuk mengeluarkan kebijakan atau program-program yang dapat menekan angka kemiskinan yang juga sekaligus dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satu bantuan sosial yang dikeluarkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut BPS Bappenas (2018), pelaksanaan CCT di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dimulai pada tahun 2016 terjadi signifikan target penerima dari sebanyak 6.000.000 keluarga menjadi 10.000.000 keluarga di tahun 2018. Kalau dibandingkan dengan negara pelaksanaan CCT di dunia, Indonesia masih terbilang jauh dari Brazil yang sudah mencapai 27.000.000 di tahun 2014. Pembuktian keberhasilan program keluarga harapan yakni dapat menurunkan angka kemiskinan dari jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 10,12% per September 2017 menjadi 9,50% per September 2018 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,62%. Selain itu, memiliki tingkat efektifitas paling tinggi terhadap penurunan koefisiensi gini dari angka 0,391 tahun 2017 menjadi 0,380 tahun 2018 (BPS, 2022).

Menurut Subandi (2011), mengatakan bahwa ukuran kemiskinan itu ada dua yakni ukuran kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan absolut adalah membandingkan tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar. Sedangkan kemiskinan relatif adalah orang yang sudah mempunyai pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat sekitarnya.

Menurut Menteri Sosial (2017), menyatakan bahwa di provinsi Sumatera Utara PKH baru dilaksanakan pada tahun 2008 dengan jumlah penduduk 14.000.000 jiwa di 33 kabupaten/kota, 440 kecamatan, 6.008 kelurahan/desa, dan penduduk yang dikategorikan miskin sebesar 10,22%. Keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH Sebesar 293.000 orang yang tersebar di kabupaten/kota (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022). Berikut ini dapat dilihat penduduk miskin di Sumatera Utara pada tabel 1.1, yakni:

Tabel 1.1
Penduduk Miskin di Sumatera Utara Dari Tahun 2018-2022

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase
2018	1.324,98	9,22
2019	1.282,04	8,83
2020	1.283,29	8,75
2021	1.343,86	9,01
2022	1.268,19	8,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas adalah data jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara periode 2018-2022, Sumatera Utara

mengalami fluktuasi kenaikan di tahun 2018 hingga 2021 dan mengalami penurunan penduduk miskin pada tahun 2019-2022. Data BPS Sumatera Utara tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,22%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8,83%, tahun 2020 mengalami penurunan kembali 8,75%, tahun 2021 mengalami peningkatan lagi 9,01%, tahun 2022 mengalami penurunan drastis sebesar 8,42% penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022).

Pendidikan berkualitas dapat menjadi sasaran perlindungan akal dalam masa kini maupun masa depan. Wujudnya adalah perubahan pendidikan Islam dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dari segi input maupun output. Pendidikan Islam haruslah berorientasi pada pembinaan pribadi yang religius sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran {3}: 190-191 dan surah Al-Mujadillah [58]: 11 yang bermakna dapat memberikan landasan perubahan pendidikan Islam yang penuh toleransi dan kompetitif (Firmansyah, 2018).

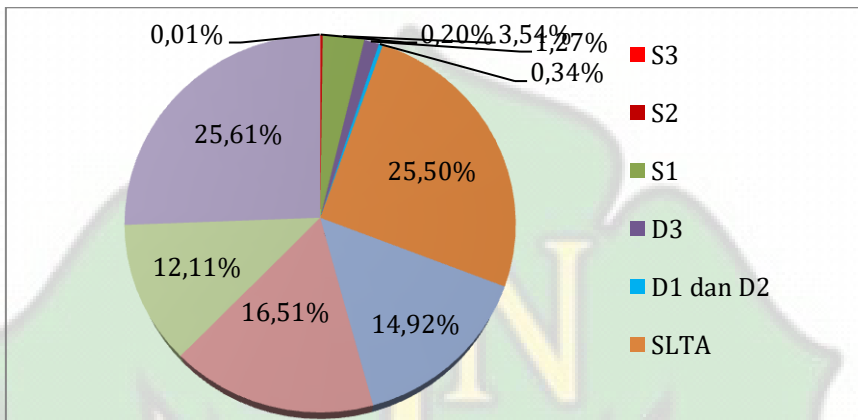
Islam mengajarkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting, karena manusia sebagai khalifah yang bertugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu, agar manusia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik diperlukan sikap personalitas yang berkualitas dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, hal itu hanya dapat dipenuhi melalui pendidikan (Tafsir, 2007). Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (2013), menyatakan

bahwa tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah secara tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu (*tholabul ilmi*). Seperti sabda Rasulullah SAW tentang kewajiban menuntut ilmu. Artinya: “*Bersumber dari Anas Bin Malik ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim*”(HR. Abu Dawud).

Menurut Saputra (2019), mengatakan bahwa penduduk Sumatera Utara berjumlah 15,8 juta jiwa hingga akhir Juni 2021, kualitas pendidikannya dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun masih ada terjadi ketimpangan penduduk yang belum pernah merasakan bangku sekolah dan buta huruf di Sumatera Utara terutama yang tinggal di perdesaan. Selain itu, secara keseluruhan, penduduk berumur 10 tahun ke atas di perdesaan mayoritas hanya menamatkan sampai pada pendidikan Sekolah Dasar (SD). Bandingkan dengan wilayah perkotaan yang mayoritas menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini tentu menandakan telah terjadi ketimpangan antar wilayah perdesaan dan perkotaan di Sumatera Utara sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, agar pembangunan sarana yang mendukung pendidikan mudah diakses oleh masyarakat terutama di daerah perdesaan. Akan tetapi, hal tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai program yang diberikan oleh pemerintah. Berikut

dapat dilihat jumlah penduduk yang berpendidikan di Sumatera Utara, yaitu;

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Yang Berpendidikan Tahun 2021



Sumber: Data Diperoleh dari BPS (2021)

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, penduduk di Sumatera Utara yang berpendidikan lulusan S3 sebesar 0,1% (1.476), lulusan S2 sebesar 0,2% (30.528), lulusan S1 sebesar 3,54 % (537.438), lulusan D3 sebesar 1,27% (193.031), lulusan D1 dan D2 sebesar 0,34% (51.228) sekolah lanjutan tingkat atas sebesar 25,5% (3.871.322), sekolah lanjutan tingkat pertama 14,92% (2.264.354), tamat sekolah dasar 16,51% (2.505.686), dan belum tamat sekolah sebanyak 25,61% (1.838.112), tidak sekolah sebesar 25,61% (3.887.621) (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021). Dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Sumatera Utara masih dalam progress kearah yang lebih baik, meskipun lebih banyak penduduk yang tidak/ belum sekolah daripada penduduk yang berpendidikan lulusan S3.

Kecamatan Brandan Barat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Sumatra Utara dan juga merupakan daerah penerima dana PKH. Pada 2008, Penerima Manfaat pada Kecamatan ini dinilai kurang tepat sasaran, karena ada masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan tidak digunakan untuk keperluan penduduk sehingga diminta untuk evaluasi kembali. Kecamatan Brandan Barat terbagi menjadi 7 desa, menurut BPS Langkat desa Lubuk Kertang termasuk desa yang paling banyak penduduknya mencapai 3.128 jiwa. Desa ini juga termasuk desa yang menerima bantuan sosial program keluarga harapan dengan total 65 KPM (BPS, 2020). Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat, menurut data yang diperoleh bahwa jumlah masyarakat penerima PKH adalah 175 orang dan penerima program keluarga harapan dalam pendidikan sebanyak 65 orang. Setiap 3 bulan sekali penerima dari program keluarga harapan dalam pendidikan SD sejumlah Rp250.000, SMP sebesar Rp350.000, dan SMA sebesar Rp500.000 di Desa Lubuk Kertang (Kepala Desa, 2022).

Upaya peningkatan pendapatan masyarakat adalah salah satu bagian penting menjaga kestabilan perekonomian rumah tangga dari permasalahan perlambatan perekonomian. Banyak anak yang usia sekolah sekitar umur 7-16 tahun yang putus sekolah dan hanya memilih mencari pekerjaan untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Padahal pemerintah sudah memberikan keputusan anak usia sekolah wajib belajar hingga dua belas tahun (Kemensos, 2021).

Salah satu tujuan dari PKH adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak-anak khususnya di tingkat SD, SMP dan SMA, serta untuk mengurangi angka pekerja di bawah umur di Indonesia. Bantuan sosial PKH biasanya akan dikeluarkan setiap 3 bulan sekali pada bulan Januari, Juli dan Oktober. PKH dalam sektor pendidikan berupaya untuk memotivasi rumah tangga sangat miskin (RTSM) agar dapat mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan berkomitmen hadir dalam proses pembelajaran, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam satu bulan, selama ajaran berlangsung (Kemensos, 2021).

Indikator bantuan sosial program keluarga harapan yaitu kepuasan, pelayanan dan kemanfaatan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki beberapa indikator dasar seperti kecepatan, keadilan mendapatkan pelayanan, kemampuan petugas, tanggung jawab, keamanan, kewajaran biaya, kesopanan, keramahan, biaya dan lain sebagainya (Peraturan Menteri Pendayagunaan, 2004). Menurut Djazuli (2010), indikator program layanan dalam Islam, yaitu: a. kemudharatan harus dihilangkan (*ad-dhararu yuzalu*), b. kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu (*al-mashlahul'ammah muqadadamah'alal mashlahatil khasshah*), serta c. mencari kemaslahatan dengan menolak kemudharatan (*jalbul mashalih wa daf'ul mafasid*).

Menurut Azwar (2008), kriteria yang menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi kalau kebutuhan mereka tercukupi, indikator kesejahteraan yakni terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, dikarenakan harta yakni salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan maupun papan. Oleh karena itu, pentingnya maqashid syariah terhadap PKH, terutama dalam pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Karena PKH memiliki tiga aspek yang dapat meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hal tersebut merupakan aspek-aspek yang mendasar dalam pembangunan manusia dalam Islam melalui konsep maqasid syariah.

Peneliti memilih lokasi Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara adalah pada data primer program keluarga harapan khususnya pada bidang pendidikan adanya angka partisipasi pendidikan yang masih rendah. Karena menurut Gubernur Sumatera Utara (2022), mengatakan bahwa kualitas pendidikan masih berada di peringkat 27 dari 33 provinsi di Indonesia. Alasan lain yang membuat peneliti juga tertarik melakukan penelitian dikarenakan beberapa penelitian terkait permasalahan yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta pada program keluarga harapan adalah puas, dimana hasil nilai rata-rata nya 3,21, artinya bahwa terdapat kepuasan dalam bantuan yang diberikan

program keluarga harapan selama ini pada peserta di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan. Selanjutnya, hasil penelitian mengatakan bahwa ada pengaruh PKH di bidang pendidikan terhadap peningkatan Kesejahteraan masyarakat pada rumah tangga sangat miskin di kelurahan Kotakulon kecamatan Bondowoso (Hernanik, 2017). Serta penelitian Diana (2021), juga menyatakan bahwa bantuan sosial Program Keluarga Harapan layanan pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jaminan sosial.

Penelitian mengenai pengaruh kepuasan layanan bansos ada dilakukan oleh Ramadhan (2022), mengatakan bahwa adanya pengaruh kepuasan layanan bansos terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan mengalami peningkatan sebesar 69,3%, dikarenakan masyarakat merasa puas atas program bansos yang diberikan oleh pemerintah. Program layanan bansos berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan sebesar 41,68%, dikarenakan bantuan PKH dan BLT Desa yang diberikan oleh pemerintah telah memenuhi sasaran dan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan perundang undangan tentang perlindungan sosial (Muharir, 2021). Sedangkan menurut Haqiqi (2021), mengatakan bahwa adanya pengaruh positif kemanfaatan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan sebesar 85,5%, dikarenakan mampu memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu dibutuhkan penelitian tentang bansos pkh terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Penelitian diharapkan dapat menunjukkan faktor utama yang melatarbelakangi bansos PKH dalam pendidikan. Penelitian ini merupakan eksistensi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitralisma & Ernitawati (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji lagi ke dalam perspektif ekonomi Islam, dan lebih fokus terhadap kualitas pendidikan dengan indikator kepuasan layanan, program layanan, dan kemanfaatan layanan. Serta unit analisis dan periode waktu penelitian. Unit analisis penelitian ini adalah Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.

Beberapa daerah sudah melaksanakan bantuan sosial PKH salah satunya adalah di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik membahas tentang “**Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Kualitas Pendidikan)**” studi di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepuasan layanan program keluarga harapan berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam

kualitas pendidikan di desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera utara ?

2. Apakah program layanan bantuan sosial keluarga harapan berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara ?
3. Apakah kemanfaatan layanan program keluarga harapan berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara ?
4. Apakah kepuasan, program, dan kemanfaatan program keluarga harapan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kepuasan layanan program keluarga harapan berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di desa Lubuk Kertang Brandan Barat Sumatera Utara.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh program layanan bantuan sosial keluarga harapan terhadap kemaslahatan masyarakat

dalam kualitas pendidikandi desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara

- 3) Untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan program keluarga harapan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikandi desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kepuasan, program, dan kemanfaatan program keluarga harapan secara bersama-sama terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikandi desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memenuhi beberapa hal adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan bantuan sosial program keluarga harapan dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Secara praktis, dapat membantu memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai bantuan sosial program keluarga harapan terhadap kemaslahatan masyarakat, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi terkait pembahasan bantuan sosial program keluarga harapan.

3. Secara empiris, kebijakan dapat membantu pemerintah untuk lebih memahami pengaruh bantuan sosial program keluarga harapan terhadap kemaslahatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan adalah bab pertama sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan memperoleh gambaran secara umum tentang pembahasan penulisan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori adalah menjelaskan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran yang diteliti dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

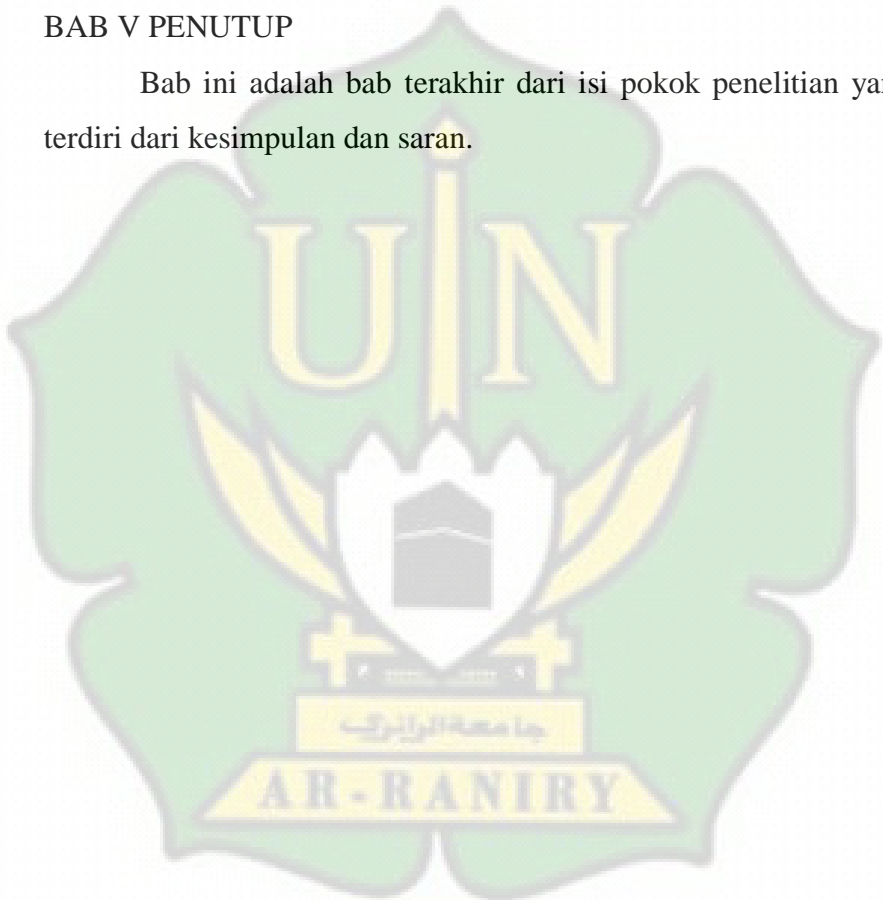
Bab metode penelitian yakni menjelaskan tentang desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik, metode analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini yakni menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari isi pokok penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

2.1.1 Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (2012), bantuan sosial mengacu pada pemberian bantuan secara terputus-putus dan selektif kepada masyarakat dalam bentuk barang atau uang, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan secara langsung kepada masyarakat atau badan kemasyarakatan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama dan perlindungan sosial serta tidak berkesinambungan dan selektif. Menurut Kementerian Sosial (2021), penyaluran PKH dapat dilakukan secara bertahap selama satu tahun anggaran yang berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai ketetapan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kemensos, 2021).

Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong kepada sesama manusia tanpa memandang agama, suku dan ras

apapun. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah{5}: 2, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِحُلُوْا شَعَائِرِ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَمِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمِ وَالْعُدُوَانِ ۗ وَاَتَقُوْا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (۲)

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah Kamu menlanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridhaan tuhan nya. Tetapi, apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari masjid haram mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan nya”.* (QS. Al-Ma’idah[5]: 2)

Ayat tersebut menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan antar sesama manusia agar dapat bermanfaat dan meringankan beban orang lain.

Kriteria yang menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi kalau kebutuhan mereka tercukupi, indikator kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, menurut Al-Ghazali al-maslahah yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan harta, dikarenakan harta

yaitu salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yakni sandangan, papan dan pangan (Azwar, 2008).

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Quraisy :3-4 Allah SWT berfirman, yaitu:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah tuhan (pemilik) rumah ini (ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”(QS. Al-Quraisy{106}: 3-4).

Berdasarkan ayat tersebut indikator kesejahteraan adalah menghilangkan rasa lapar masyarakat dengan cara memberikan bantuan sosial.

Jadi, bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin baik itu dalam bentuk barang/jasa secara tunai atau non tunai yang sifatnya tidak secara terus menerus, serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Dasar Hukum Bantuan Sosial

Menurut Kemensos (2021), dalam pembukaan undang-undang alinea keempat dan pasal 34 Ayat 1 Maka Turunlah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial yakni implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan

pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bantuan uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial. Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk PKH sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Adapun hukum bantuan sosial dalam Islam yaitu dalam Islam meminta-minta merupakan suatu hal yang harus dihindari, walaupun dalam keadaan tertekan dan/atau butuh. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan kegiatan bantuan sosial. Dengan alasan bahwa hal tersebut sebagai pengaduan diri kepada orang lain, yang mana kita seharusnya mengadu kepada Allah SWT. Sehingga Islam menganjurkan untuk bekerja secara halal dalam memenuhi kebutuhannya. Rasulullah SAW bersabda: *“Tangan diatas (memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (meminta)”*.

Akan tetapi, dalam Islam secara mutlak tidak melarang meminta bantuan dengan kondisi keadaan meminta-minta yang dibolehkan dalam Islam. Dalam suatu riwayat menyatakan bahwa ketika Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kehidupannya yang berat. Pada awalnya, Rasulullah SAW meminta Qabishah untuk bersedekah dan bersabar dengan rezeki yang akan datang kepadanya. Dikarenakan

tanggungannya yang begitu berat, ia bertanya kepada Rasulullah SAW dengan malu-malu, *“Wahai Rasulullah, sambil menunggu sedekah yang datang, bolehkah aku meminta-minta?”*, tanya Qabishah. Rasulullah SAW menjawab: *“Bahwa meminta-minta itu tidak diperkenankan dalam Islam. Akan tetapi, Ada tiga orang yang dibolehkan meminta-minta, yaitu: a. orang yang terkena musibah dan kehilangan harta, b. orang yang memikul beban berat diluar batas kemampuannya, dan c. orang yang sangat miskin. Dengan tegas Rasulullah SAW, bersabda: ”Diluar dari ketiga tersebut, hukum meminta-minta tidak diperkenankan. Dan ketika ada orang yang meminta-minta di luar dari kelompok tersebut, maka hukumnya haram, karena harta haram telah dimakannya”*.

2.1.3 Program Keluarga Harapan

Sejarahnya supaya memperbaiki sasaran penerima bantuan sosial PKH, pada tahun 2012 menggunakan basis data terpadu dari hasil pendataan program perlindungan sosial yang telah dilakukan di tahun 2011, setelahnya dikelola oleh tim nasional percepatan dan penanggulangan kemiskinan. Program tersebut menysasar pada masyarakat yang ada di garis kemiskinan dan memiliki kerentanan sosial. Adanya program ini diharapkan dapat mewujudkan perubahan yang berarti secara perlahan-lahan agar dapat menghentikan rantai kemiskinan yang terus bergantian. Oleh karena itu, program bantuan sosial ini bisa berupa uang tunai maupun non tunai. Tetapi, akan memberikan pendampingan sosial yang bertujuan untuk memberikan edukasi pada keluarga penerima

manfaat agar dapat hidup mandiri dan meningkatkan taraf hidup keluarganya(Kemensos, 2021).

Program tersebut PKH bukan merupakan lanjutan dari program subsidi langsung (SLT) yang diberikan pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin. Akan tetapi, PKH dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Kemensos (2021), mengatakan bahwa program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan secara tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada awalnya program bantuan sosial adalah untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi, rawan pangan, berkurangnya kesempatan kerja, penyediaan fasilitas sosial seperti di bidang kesehatan dan pendidikan, serta menurunnya ekonomi masyarakat. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara atau lembaga. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelompok, keluarga atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial serta bersifat bersyarat maupun tidak bersyarat(Kemensos, 2021).

Program perlindungan sosial yang dikenal di Internasional dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup

berhasil dalam penanggulangan kemiskinan yang dihadapi di setiap negara, terutama permasalahan kemiskinan. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka peluang kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar kita (Kemensos, 2021)

Pemerintah meresmikan program keluarga harapan sejak Juli 2007 sampai tahun 2018 peserta PKH sudah sebesar 10.000.000 keluarga miskin di 514 kabupaten/kota dan 6.542 kecamatan dan tahun 2019 ditargetkan harus mencapai 15.000.000 di 34 provinsi. Penyelenggaraan PKH bersifat multisektoral baik di pusat dan daerah yang melibatkan instansi pemerintah provinsi, pusat, kabupaten/kota, kecamatan, desa, serta masyarakatnya.

Menurut Kemensos (2021), mengatakan bahwa kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah untuk keluarga miskin yang memiliki beberapa kriteria, yaitu : a. Dalam keluarga tersebut memiliki ibu hamil/anak balita/ibu nifas, b. Dalam keluarga memiliki anak berusia kurang lebih 7 tahun yang belum masuk sekolah atau pendidikan dasar (usia pra sekolah), c. Dalam keluarga terdapat anak yang berusia 7 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar selama 12 tahun, d. Dalam keluarga terdapat anak penyandang disabilitas berusia 0 sampai 21 tahun.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2015: 4), bahwa setiap keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan

bantuan minimum sejumlah Rp950.000 dan maksimum Rp3.700.000. Dengan diberikan bantuan secara tetap kepada peserta PKH Rp500.000. Jika dalam keluarga memiliki ibu nifas/hamil/balita/anak usia sebelum sekolah maka ditambah Rp1.000.000, kalau memiliki anak usia sekolah pendidikan SD/MI bertambah Rp450.000, akan bertambah lagi apabila memiliki anak usia SMP, usia SMA dan sederajat maka bantuan bertambah sebesar Rp1.000.000.

Kesimpulan dari bantuan sosial PKH adalah memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat baik itu bantuan uang tunai ataupun barang kepada RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Anggaran PKH dialokasikan melalui belanja bansos di bidang perlindungan sosial yang bersyarat agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin.

2.1.4 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Pada tahun 2018 Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan regulasi baru tentang PKH dalam peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH dalam mencabut serta tidak memberlakukan peraturan menteri sosial nomor 10 tahun 2017 tentang PKH. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (2018), tentang program bantuan sosial, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
- b) Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- c) Peraturan Pemerintah Tahun 2012 Nomor 39 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
- d) Peraturan Menteri Sosial Tahun 2016 Nomor 10 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 705).
- e) Peraturan Presiden Tahun 2017 Nomor 63 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2017).

2.1.5 Tujuan dan Sasaran Bantuan Sosial Program Keluarga

Tujuan terbesar PKH dalam menurunkan kemiskinan adalah pemerintah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana sesuai dalam RPJMN 2015-2019. Sedangkan dalam bidang pendidikan adalah mendaftarkan

dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH dalam pendidikan sesuai jenjangnya, dimulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Serta untuk komponen kesejahteraan sosial seperti penyandang disabilitas berat dan lanjut usia dimulai dari usia 70 tahun (Wiku et al., 2020).

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka atau memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan merubah perilaku RTSM agar mendapat kesejahteraan (Kemensos, 2021). Sedangkan tujuan khusus dari PKH adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga sangat miskin
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak- anak rumah tangga sangat miskin
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, nifas, dan anak di bawah usia 6 tahun
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dari rumah tangga sangat miskin.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (2018 Nomor 1), sasaran penerima bantuan sosial PKH adalah keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin, dengan komponen kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial. Anak dari keluarga penerima manfaat PKH harus mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat minimal 85% dari hari belajar efektif bagi

anak usia wajib sekolah 12 tahun. Sanksi bagi keluarga penerima manfaat PKH yang tidak dapat memenuhi komitmen adalah pengurangan dari jumlah bantuan PKH yang diterima sebesar 10% untuk setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut bagi komponen PKH yang tidak memenuhi kehadirannya (Kemensos, 2021).

2.1.6 Hak Dan Kewajiban Program Keluarga Harapan

Menurut Kemensos(2021), penerima PKH memiliki hak dan kewajiban yang dimana hak penerima PKH yakni mendapatkan bantuan sosial PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, serta program bantuan komplementer di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, subsidi energi dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban keluarga penerima PKH, yaitu:

1. Kewajiban PKH pada kondisi normal terdiri dari komponen kesehatan seperti ibu nifas/hamil/ menyusui, anak usia 0-6 tahun yang belum wajib sekolah untuk diperiksa kesehatannya pada layanan/fasilitas kesehatan.
2. Untuk komponen pendidikan seperti anak usia wajib sekolah selama 12 tahun dengan mengikuti kegiatan belajar dengan kehadiran minimal 85% dari belajar efektif.
3. Kesejahteraan sosial seperti penyandang disabilitas berat atau lansia, wajib mengikuti kegiatan kesejahteraan minimal setahun sekali.
4. KPM wajib hadir setiap bulan dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga(P2K2).

2.1.7 Besaran dan Mekanisme Bantuan Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Kemensos(2021).adalah besar bantuan sosial PKH tahun 2019 yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat ada dua jenis, yaitu :

- a) Bantuan tetap bagi keluarga dalam kategori reguler sebesar Rp550.000 per tahun, sedangkan kategori program keluarga harapan dalam akses atau pelayan pendidikan dan kesehatan diberikan sebesar Rp1.000.000 per tahun
- b) Bantuan komponen untuk setiap keluarga dalam PKH adalah ibu hamil dan balita sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya, bagi anak yang masih sekolah dibedakan berdasarkan tingkatan sekolahnya, seperti anak SD/MI sebesar Rp900.000, SMP sebesar Rp1.500.000, SMA sebesar Rp2.000.000. Sedangkan untuk disabilitas berat atau cacat sebesar Rp2.400.000, dan untuk lanjut usia sebesar Rp2.400.000.

Menurut Dinas Sosial (2022), penerima PKH di desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara dalam pendidikan untuk SD sebesar Rp250.000, untuk SMP sejumlah Rp350.000, serta untuk SMA Rp500.000 yang diterima setiap 3 bulan sekali. Bantuan hanya diberikan kepada maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Apabila kelompok penerima PKH tidak memenuhi persyaratan yang diberikan akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam pembatalan dan penangguhan yang diberlakukan

kepada penerima PKH tidak memenuhi komitmennya dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi komitmen kehadiran dalam pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan ketentuan yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya dalam hal pengurangan bantuan sejumlah 10% pada setiap pemberian bantuannya.
- b. Jika dalam tiga bulan berturut-turut setiap anggota keluarga penerima PKH yang tidak memenuhi kehadiran pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berlaku , maka akan terjadi pengurangan sejumlah 100% atau tidak akan mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi anggota penerima PKH.
- c. Dikhususkan untuk daerah yang pengembangan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial belum memadai, maka penerapan sanksi dilakukan secara bertahap.
- d. Keluarga penerima manfaat yang terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai peserta PKH maka akan dikeluarkan dari kepesertaan dalam PKH.
- e. Keluarga penerima manfaat PKH yang telah dikeluarkan dari kepesertaan, tidak dapat diajukan lagi sebagai peserta program keluarga harapan.

Bantuan sosial PKH dapat diberikan kepada ibu atau wanita dewasa (nenek, bibi, dan kakak perempuan) yang dapat disebut

sebagai pengurus keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga wanita dapat terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Kecuali karena kondisi tertentu saudara wanita dewasa dalam keluarga tidak ada yang dapat menggantikan posisi kepala keluarga tersebut.

2.1.8 Alur Pelaksanaan PKH

Menurut (Kemensos, 2021), beberapa tahapan pelaksanaan PKH adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan yakni proses untuk menentukan seberapa banyak wilayah calon penerima PKH. Jumlah penerima PKH tersebut dapat bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang penentuan penerimaannya sudah ditentukan oleh direktur jaminan sosial keluarga kementerian sosial RI.

2. Pertemuan Awal Dan Validasi

Tahapan ini dilakukan oleh pendamping PKH agar penerima dapat memahami tentang validasi untuk memverifikasi data awal penerima dengan data terbaru yang sesuai dengan kriteria komponen penerima PKH. Data awal dapat diperoleh dari pendampingan PKH melalui aplikasi E-pkh untuk pelaksanaan validasi. Sebelum melakukan pertemuan awal pendamping PKH harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menentukan lokasi yang tepat untuk pertemuan dengan kepala desa

- b) Mengundang para perangkat desa, pendidikan dan lain sebagainya.
- c) Menyebarkan informasi kepada calon penerima PKH dan mempersiapkan keperluan lainnya.

Setelah melakukan persiapan, pertemuan awal pendamping dilakukan sosialisasi mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima PKH, tujuan dari PKH dan melengkapi data untuk membuka rekening bank, memberi pemahaman tentang anjuran dan sanksi kalau tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima PKH, membuat jadwal disalurkan bantuan sosial PKH, serta sanksi apabila tidak memenuhi komitmen yang telah dijelaskan dan ditentukan tentang penyaluran PKH.

Selanjutnya dilakukan tahap validasi dengan mengundang calon penerima PKH untuk hadir pada pertemuan pertama. Apabila calon yang diundang tidak hadir pada pertemuan pertama maka akan dibantu oleh pendamping PKH dengan berkunjung langsung ke rumahnya. Pendamping harus melengkapi data calon penerima agar dapat mengakses dalam membuka rekening bank untuk penyaluran bantuan sosial. Kesimpulannya adalah validasi data minimal harus memenuhi Know Your Customer (KYC).

3. Tahapan Penetapan PKH

Hasil data eksiting verifikasi calon peserta dan pemutakhiran akhir data sesuai dengan kriteria kepesertaan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Setelah

itu, rekening data yang sudah aktif ditetapkan sebagai KPM PKH. KPM tersebut akan ditetapkan sebagai anggota PKH melalui surat keputusan direktur jaminan sosial keluarga.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

Bentuk bantuan sosial PKH yang diberikan secara tunai baik itu secara perorangan, keluarga atau masyarakat yang sudah ditetapkan oleh direktur jaminan sosial keluarga sebagai penerima PKH. Setelah itu, direktur jenderal perlindungan dan jamnan sosial menetapkan bahwa tahapan penyaluran bansos kepada penerima PKH dilakukan secara bertahap dalam setahun anggaran berjalan sesuai dengan rencana penyaluran bansos.

Sistem penyaluran bansos PKH dijalankan secara non tunai. Karena bantuan tersebut dapat dicairkan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) ataupun dari buku tabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktorat jaminan sosial keluarga menyerahkan pembukaan rekening bantuan sosial dikerjakan secara kolektif dan terpusat sesuai dengan data yang diterima dari bank penyalur.
- b. Setelah pembukaan rekening maka kartu keluarga sejahtera, buku rekening akan dicetak dan PIN Mailer
- c. Kegiatan edukasi dan sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bansos secara non tunai. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian sosial republik Indonesia bekerja

samadengan bank penyalur dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing.

- d. Pendistribusian KKS kepada penerima dilakukan oleh bank penyalur dan akan dikoordinasikan oleh dinas sosial setempat seperti penyerahan KKS, PIN Mailer dan buku tabungan.
- e. Proses penyaluran bansos dilakukan oleh bank penyalur dengan memindahkan buku dari pemberi dana bansos kepada penerimanya.
- f. Penarikan dana bansos dapat dilakukan melalui jasa lembaga pembayaran seperti ATM, Agen bank, e-warung, dan cabang bank.
- g. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial yakni tindakan yang dilakukan untuk melakukan pengecekan dan pencocokan administrasi. Penyaluran dilakukan melalui aplikasi e-PKH oleh SDM PKH setiap setelah menerima bansos. SDM PKH memberikan informasi bisa atau tidaknya dilakukan pencairan dana dan memberi pemahaman penyebab tidak dapat mencairkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Evaluasi, pelaporan dan pelaporan bansos adalah rangkaian pelaksanaan yang dilakukan oleh staff PKH kementerian sosial, praktisi PKH setempat, dan bank penyalur untuk memastikan bansos PKH diterima

- i. Pemanfaatan bansos yang diterima PKH adalah dapat berguna untuk keperluan pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan PKH

5. Pemutakhiran Data

Tujuan pemutakhiran data adalah untuk memverifikasi status terbaru sebagai peserta PKH, karena data tersebut adalah data dasar program perlindungan sosial. Paling penting dari data tersebut adalah informasi, pemberhentian dan menyalurkan bansos kepada KPM. Beberapa perubahan informasi dari KPM, yaitu:

- a. Transformasi eligibilitas KPM
- b. Transformasi nama pengurus karena perceraian, hilang ingatan, tuntutan pidana dan kematian
- c. Transformasi komponen KPM
- d. Transformasi layanan pendidikan dan kesehatan yang digunakan
- e. Transformasi data anggota keluarga dan pengurus sesuai dengan data kependudukan
- f. Perpindahan alamat KPM
- g. Perubahan data bantuan program komplementer
- h. Kesejahteraan sosial ekonomi

Pelaksanaan entri data untuk pemutakhiran data melalui e-PKH dapat dilakukan pendamping setiap kali terjadi kesejahteraan yang ditemukan pada setiap kunjungan ke KPM PKH.

Hasil pemutakhiran data melalui e-PKH dikirimkan Kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

6. Verifikasi Komitmen

- a. Kewajiban terkait pemanfaatan KPM PKH di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesehatan. Harus memenuhi kewajiban tersebut, pelaksanaan PKH mengharuskan seluruh penerima untuk mendaftar, terlibat, dan memiliki akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.
- b. Memverifikasi kepesertaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta PKH terdaftar, kepesertaan, akses yang teratur dan sesuai protokol layanan pendidikan, kesejahteraan sosial serta kesehatan.
- c. Mengentri data verifikasi bulanan yang diperlukan melalui aplikasi e-PKH untuk mencatat kehadiran di setiap kunjungan layanan pendidikan, medis dan kesejahteraan sosial oleh pendamping PKH.
- d. Data hasil entri verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penangguhan, penyaluran, dan penghentian bantuan.

Kegiatan Verifikasi komitmen dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan *Force Majeure* (kabar) dengan ketentuan lebih lanjut sudah tercantum dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

7. Pendampingan

Untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan medis, kesejahteraan sosial, dan pendidikan diperlukan pendampingan bagi KPM PKH. Peran dan fungsi pendampingan sosial adalah untuk fasilitasi, advokasi, edukasi, mediasi, dan motivasi KPM PKH.

Implementasi proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan yang terkendala atau membutuhkan akses layanan, akan tetapi melalui pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan terhadap kelompok dapat dilakukan oleh pendampingan sosial PKH melalui; a. pertemuan kelompok (PK) untuk pelaksanaan tugas yang bersifat edukatif dan administratif dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH, akses terhadap layanan kesejahteraan sosial, medis dan pendidikan, serta kegiatan rutin dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang diselenggarakan oleh pendampingan sosial. b. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yakni pembelajaran terstruktur agar dapat mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH.

8. Transformasi Kepesertaan

Penerima bansos PKH akan diberikan selama enam tahun, setelah itu diharapkan terjadi perubahan perilaku KPM dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai KPM PKH dari kegiatan

resertifikasi. Kegiatan resertifikasi tersebut, KPM kembali melakukan pendataan ulang dan evaluasi status sosial ekonominya setelah memperoleh bantuan PKH selama dalam waktu tertentu. Pada tahun ke lima menjelang berakhirnya kepesertaan PKH selama enam tahun, KPM akan dilakukan resertifikasi yang hasilnya akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepesertaan PKH yakni transisi atau graduasi.

- a. Transisi adalah peserta PKH dalam kondisi masih memenuhi syarat PKH. Pada masa transisi peserta PKH tetap menerima bantuan selama 3 tahun dan wajib memenuhi KPM PKH serta mempersiapkan untuk menerima program pengentasan kemiskinan lainnya.
- b. Graduasi adalah peserta PKH yang memenuhi syarat PKH, yaitu; masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH, tidak miskin tetapi masih memenuhi syarat PKH, dan tidak miskin serta tidak memenuhi syarat PKH.

2.2 Indikator Bantuan Sosial PKH

2.2.1 Kepuasan Layanan Bantuan Sosial PKH

Kepuasan adalah “*satisfied customer improve business and dissatisfied customer impair business*”, bahwa hal yang tidak mudah dalam menciptakan kepuasan sekaligus dengan mempertahankan kepuasan yang akan menyebabkan badan usaha sulit untuk bertahan dalam menghadapi persaingan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan kecewa atau senang seseorang akan

timbul setelah membandingkan hasil (kinerja) produk yang diharapkannya (Dukta, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan (Nomor 25: 2004), Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki beberapa indikator dasar, yaitu kecepatan, keadilan mendapatkan pelayanan, pelayanan, prosedur persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas, kemampuan petugas, tanggung jawab petugas, keamanan, kewajaran biaya, kesopanan, keramahan, kepastian jadwal dan biaya (Oktavia, 2019).

Indikator kepuasan layanan bantuan sosial PKH menjadi tolak ukur dan penilaian tingkat kepuasan peserta seperti dari hak dan kewajiban peserta, penyaluran dananya, pelayanan pendamping serta penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan kebutuhan (Oktavia, 2019). Sedangkan dalam ekonomi Islam, kepuasan seorang muslim disebut qana'ah. Karena kepuasan (Qaana'ah) yakni cerminan kepuasan seseorang baik secara lahiriyah dan bathiniyah. Kepuasan dalam Islam tersebut yang mendorong seorang konsumen untuk bersikap adil serta berkaitan dengan keimanan yang melahirkan rasa bersyukur (Dukta, 2008). Dalam mencapai tingkat kepuasan seorang muslim seharusnya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang akan dikonsumsi sudah halal secara zatnya ataupun secara memperolehnya, dan tidak bersikap boros (*isrof*) sia-sia (*tabzir*) sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl : 114, yaitu:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ { ١١٢ }

Artinya :*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah”*. (QS. An-Nahl: 114)

2.2.2. Program Layanan Bantuan Sosial PKH

Program layanan publik adalah salah satu tugas yang penting harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, dikarenakan apabila komponen pelayanan mengalami permasalahan maka sebagian sektor juga akan mengalami permasalahan. Secara etimologi pelayanan publik terdiri dari kata pelayanan dan publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tingkat kepuasannya hanya bisa dirasakan oleh orang yang dilayani atau melayaninya yang berdasarkan kemampuan penyediaan jasa dalam memenuhi harapannya. Sedangkan publik adalah sejumlah orang yang memiliki kebersamaan baik itu secara pikiran, sikap, harapan, tindakan dan perasaan yang benar yang didasarkan nilai-nilai norma yang dimilikinya (Moenir, 2008).

Menurut Kominfo (2018), mengatakan bahwa kementerian koordinat bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) yang sesuai dengan perpres No.9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK yang akan bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Salah satu urusannya

yakni untuk menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bansos pada masyarakat. bantuan tersebut bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos. Adapun program bansos tersebut adalah program indonesia pintar (PIP), program jaminan kesehatan nasional (JKN-KIS), program keluarga harapan (PKH), dan bansos rastra (bantuan pangan non tunai) yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Kasmir menyatakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standard yang ditentukan (Pasalong, 2011).

1. Program Layanan Publik Dalam Islam

Islam menganjurkan untuk semua manusia agar senantiasa mmeberikan pelayanan yang berkualitas, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 267, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَلَا تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {٢٦٧}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu memafkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuinya,

bahwaallah maha kaya lagi maha terpuji (QS. Al-Baqarah {2}: 267).

Kesimpulan dari ayat di atas yakni para petugas pelayanan, hendaknya memperlakukan dan melayani seseorang dengan baik seperti ia memperlakukan dirinya sendiri.

Rasulullah SAW bersabda: “ *Sebaik-baiknya kalian yakni orang yang diharapkan kebaikannya serta keburukannya terjaga*” (HR. Tirmidzi). Syariat islam menilai segala perbuatan ataupun pelayanan terbaik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya telah berbuat baik untuk dirinya sendiri.

Apabila disertai tanggung jawab oleh negara, akan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT akan murka kepadanya sehingga tidak akan mendapatkan perhatian Allah SWT di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, “ *Barangsiapadiserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kamu yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak dikhirat Allah tidak akan mengindahkannya*”.

Menurut Djazuli (2010), pelayanan publik dalam fiqih, yaitu: a. kemudharatan harus dihilangkan (ad-dhararu yuzalu), b. kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu (al-mashlahul’ammah muqaddamah’alal mashlahatil khasshah), dan c. mencari

kemaslahatan dengan menolak kemudharatan (jalbul mashalih wa daf'ul mafasid).

2. Indikator Dasar Hukum Program Layanan Publik

Tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, mudah, terjangkau, cepat, dan terukur. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk, biaya, sarana dan prasarana. Kualitas pelayanan PKH diukur dengan indikator dari dimensi berwujud (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan kepastian (assurance), dan empati (empathy) (Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, 2011).

Pelayanan publik menurut pasal 1 UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu: "rangkaiian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Maksudnya adalah antara harapan pemerintah dengan maqa'idus syari'ah (tujuan utama dalam islam) yakni bagaikan bola mata dengan selaputnya.

2.2.3 Kemanfaatan Layanan Publik Bantuan Sosial PKH

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah faedah atau guna, laba maupun untung. Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata. Asas kemanfaatan adalah melaksanakan atau menegakkan hukum, sebuah peraturan yang harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat.

Bantuan sosial yang telah diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, modal usaha, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang dapat mendukung tercapainya tujuan PKH tersebut. Dalam bidang pendidikan, dana yang didapatkan oleh keluarga penerima PKH dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak seperti membeli seragam sekolah, perlengkapan sekolah, biaya dan tabungan sekolah (Kemensos, 2021).

2.3 Kemaslahatan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Kemaslahatan Masyarakat

Maslahah berasal dari kata salah yang berarti baik lawan dari kata usak atau buruk. Sedangkan masalah yakni berasal dari kata masdar yang berarti manfaat atau terlepas daripada kerusakan. Masalah dalam bahasa arab yakni perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan umum. Secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia atau dapat

menghasilkan keuntungan dan menghindarkan terjadinya kerusakan.

Menurut Al-Syatibi adalah konsep kepemilikan harta lewat maqasid al-syariah yang dimana tidak boleh beredar hanya di kalangan aghniya (kaya), agar terwujud keadilan sosial dan ekonomi di antara umat. Masalah merupakan apa yang akan dikembalikan kepada kehidupan yang sempurna dan kehidupan dunia untuk kehidupan yang akhirat. Menurut Asy-Syatibi (1997) mengatakan bahwa masalah adalah keadaan dimana kemaslahatan lebih banyak dan kuat, sedangkan kemafsadahan adalah mafsadah yang lebih kuat dan lebih banyak.

Dengan demikian, kemaslahatan adalah kemaslahatan yang menjadikan tujuan ketentuannya berdasarkan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan hawa nafsu dan keinginan manusia. Karena suatu ketentuan syara' yang tidak mempunyai dasar dalil dan tidak ada illat dalam menentukan suatu hukum yang ditentukan oleh syariat, maka suatu kejadian tersebut dinamakan masalah.

Kemaslahatan masyarakat (Maqasid syariah) adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer (dharuriyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat). Maqashid syariah adalah hikmah, makna, dan sesamanya yang dijaga oleh hukum-hukum yang disyariatkan baik secara umum maupun khusus untuk menciptakan kebaikan semua umat manusia.

Menurut Mas'ud (1995), menyatakan bahwa para sarjana kontemporer membagi kriteria masalah menjadi dua, yaitu: masalah yang bersifat mutlak bukan relatif ataupun subjektif yang membuat tunduk pada hawa nafsu. Sedangkan masalah yang bersifat kulliyah (universal) dan tidak bertentangan dengan juzziyatnya. Masalah adalah tujuan utama dari maqashid syariah agar tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

Definisi maqashid al-syariah adalah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah SWT. Sedangkan berdasarkan istilahnya bahwa maqashid syari'ah dari pernyataan wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti atau tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh atau beberapa permasalahan dan sebagai sasaran syari'at dan dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum syar'i yang berdasarkan syariat Allah SWT dan Rasulullah SAW (Azharsyah, Ibrahim, 2021).

Menurut Jauhar (2013), dalam kitab Al-muwafaqat karya Asy-syatibi mengatakan bahwa keamaslahatan dalam kehidupan dunia diklasifikasikan menjadi dua kategori, baik yang akan dicapai melalui cara menggapai kemanfaatan maupun yang akan didapat melalui cara mencegah kemudharataan adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan pokok (dharuriyat) adalah maslahat yang berada pada prioritas utama dalam maqashid syari'ah.

- b. Bukan kemaslahatan pokok (ghairu dharuriyah) adalah kemaslahatan yang dianggap penting sehingga dapat dipisahkan.

2.3.2 Macam- Macam Kemaslahatan Masyarakat

Menurut Jauhar (2013), menyatakan bahwa apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariah disebut dengan mafsadah/kerusakan. Setiap ungkapan mafsadah dan masalah adalah bentuk yang masih umum, serta menurut jumhur ulama merupakan segala sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia maupun akhirat. Jika dalam ketentuan syariat dengan melihat kemaslahatannya dari keberadaannya, yaitu:

- a) Masalah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan dari minum khamar yang dapat menghilangkan stress, dan lain sebagainya.
- b) Masalah mursalah adalah keputusan yang didasarkan atas manfaat dan guna yang sesuai dengan tujuan ketentuan syara yang dimana kepentingan umum dalam menolak mafsadat atau mengambil suatu manfaat dari suatu perkara. Misalnya, berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank yang hukumnya tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. MUI menetapkan fatwa bahwa bunga

bank haram dengan mengqiyaskan sebagai riba karena memiliki unsur tambahan yang menjadi illat haramnya riba.

- c) Masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh ketentuan syariat yang menjadikan jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut. Misalnya, kasus hukuman bagi peminum khamar dalam hadits Rasulullah SAW dan para ulama fiqh dilarang. Masalah dalam menjaga jiwa, akal, agama, keturunan dan harta. Dalam hukum syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, hukum hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan (maruah), qisos untuk menjaga jiwa, hukuman potong tangan atas pencurian untuk menjaga harta, dan hukum peminum arak untuk menjaga akal.

2.3.3 Indikator Kemaslahatan Masyarakat

Menurut Mufid (2016), maqashid syariah memiliki tiga tingkatan yakni dharuriyyat (primer) adalah untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial yang sesuai untuk kebutuhan manusia, hajjiyat (sekunder) adalah untuk kebutuhan yang tidak bersifat esensial dalam kebutuhannya agar manusia terhindar dari kesulitan hidup, dan tahsiniyat (tersier). Tingkatan maqashid syariah berdasarkan peringkat kemaslahatannya adalah sebagai berikut ;

1. Menjaga Agama (Hifzu Ad-Din)

Memelihara agama adalah menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya. Memelihara agama dalam peringkat

dharuriyat (primer) adalah melaksanakan kewajibannya, seperti melaksanakan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui BAZ dan LAZ. Selain itu, memelihara agama dalam peringkat hajiyyat adalah melaksanakan ketentuan agama dalam menghindari kesulitan, seperti shalat baik itu jamak dan qashar bagi orang yang sedang berpergian jauh. Sedangkan memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat adalah mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus pelengkap pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT, seperti menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat serta membersihkan badan. Kaitan PKH dengan pendidikan adalah suatu bantuan yang bukan dipakai untuk bermewah-mewahan karena bantuan tersebut hanya untuk rumah tangga yang sangat miskin. Bantuan untuk pendidikan agar bisa merubah etika dan moral masyarakat, seperti berbicara, mencuri, berbuat jahat kepada yang lebih muda dari mereka, serta sesuai dengan pancasila dalam sila ke-3 kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ankabut (29): 45 Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ فَلَا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : “*Bacalah kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*” (QS. Al-Ankabut: 45).

2. Memelihara Akal (Hifz Al-Aql)

Memelihara akal adalah memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, misalnya diharamkan meminum-minuman keras yang apabila dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu. Serta memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, misalnya menghindari diri dari menghayal. Kaitan PKH dengan pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia untuk memperbaiki pola tatanan hidup, namun tanpa pendidikan manusia bisa berbuat sesuatu dalam kehidupannya, karena manusia bisa berpikir apa yang harus mereka lakukan melalui pemikiran mereka.

3. Memelihara Jiwa (Hifz Al-Nafs)

Memelihara jiwa adalah memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, larangan membunuh dikarenakan dapat berakibat terancam jiwa manusia apabila diabaikan. Dalam peringkat hajiyyat, misalnya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang enak dan halal. Serta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkan etika minum dan tata cara makan, karena kegiatannya hanya berhubungan dengan kesopanan. Kaitan PKH dengan pendidikan adalah tatanan manusia berbeda-beda yang sudah digariskan oleh Allah SWT baik itu kaya maupun miskin, karena orang kaya tetap bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, serta bukan suatu keharusan

apabila manusia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun orang miskin hanya sebatas untuk membeli pakaian, makanan, serta ada yang tidak mampu bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, karena itu mampu menyiksa diri umat manusia. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17): 33, Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ قُلًا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِقُ الْقَتْلَ ۗ قُلًا إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”* (QS. Al-Isra': 33).

4. Memelihara Harta (Hifz Al-Mal)

Memelihara harta adalah memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, misalnya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan korupsi, kalau dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi harta. Dalam peringkat hajiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Serta dalam peringkat tahsiniyyat, misalnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan, karena akan berpengaruh sah atau tidak jual beli. Kaitan PKH dengan pendidikan melalui memelihara harta adalah upaya pengentasan kemiskinan dengan pendidikan agar mampu meningkatkan nilai-nilai kepedulian sosial dan kreatifitas. Dalam

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 188, Allah subhanallahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”* (QS. Al-Baqarah: 188).

5. Memelihara Keturunan (Hifz Al-Nasl)

Memelihara keturunn adalah memelihara keturunan dari peringkat dharuriyyat, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina, kalau kegiatannya diabaikan akan menyebabkan keturunan terancam. Dalam peringkat hajiyyat, misalnya ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad dan diberikan hak talak kepadanya. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya tunangan (khitbah) atau walimah dalam perkawinan. Jika hal diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan. Kaitan PKH dengan pendidikan dalam memelihara keturunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa dalam bidang pendidikan baik itu secara emosional, dan intelektualnya.

2.3.4 Kualitas Pendidikan Dalam Islam

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan,

pelatihan, pengajaran yang berlangsung di sekolah atau diluar sekolah sepanjang hidupnya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu berperan penting dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap di masa depan. Menurut Kemensos (2021), menyatakan bahwa peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan dan mengikuti kehadiran dalam pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sekolah dalam sebulan selama setahun ajaran berlangsung dengan catatan adalah sebagai berikut ;

- a) Peserta penerima PKH yang memiliki usia 7-15 tahun diwajibkan untuk mendaftar/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar seperti SD/MI, SMP dan SMA, serta kehadiran minimal 85% dari hari mulai belajar efektif. Apabila anak berusia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar atau sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- b) Untuk anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI dan SMP/MTS, sedangkan untuk yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler seperti SDLB dan SMLB.
- c) Anak peserta penerima PKH yang bekerja atau menjadi pekerja atau telah berhenti sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial dengan mempersiapkan lagi untuk masuk ke

satuan pendidikan. Program remedial tersebut seperti layanan rumah singgah yang diberikan Kementerian Sosial untuk anak jalan. Apabila persyaratan yang diberikan dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, seperti dalam pendidikan dan kesehatan, maka mereka akan memperoleh lagi bantuan yang diberikan secara teratur.

Integrasi kualitas pendidikan dalam Islam dengan *Maqashid Syariah* dalam memelihara akal (hifdu al-aql) agar tercapai kemaslahatan masyarakat yang terhindar dari tindakan-tindakan di luar agama, seperti terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maqashid Syariah* adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan Islam yang baik. Al-Qur'an memandang orang yang berilmu memiliki posisi yang mulia dan lebih tinggi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadillah (58): 11, yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadillah {58}: 11).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa pentingkan ilmu, karena Allah SWT akan memberikan kelapangan untuk yang menghadiri majelis-majelis ilmu dengan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmunya (Abdurrahman, 2016).

Maqashid syari'ah dalam bidang pendidikan yakni dua hal berbeda yang sangat ideal untuk disatukan, maqashid syari'ah adalah konsep dasar untuk melakukan pemeliharaan dalam kehidupan manusia sedangkan pendidikan yakni wujud dari pemeliharaan tersebut. Pendidikan Islam adalah usaha untuk menciptakan keseimbangan dan pemeliharaan antara ilmu maupun amalan, keseimbangan ilmu yang di dapat dari keluarga,sekolah dan masyarakat untuk diamankan sebagai bekal dikehidupan akhirat. Pemeliharaan tersebut seperti dalam menjaga harta, jiwa, keturunan dan agama agar generasi penerus bangsa terhindar dari segala perbuatan yang akan menyebabkan menurunnya nilai-nilai budaya bangsa serta nilai agama dan sosial (Gucandra, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Hasan (2017), beberapa faktor yang terjadi karena penyalahgunaan dana bantuan sosial pendidikan adalah sebagai berikut ;

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak usia sekolah
- b. Faktor pendidikan dari orang tua yang rendah
- c. Kurang kesadaran orang tua dalam pentingna pendidikan anak

- d. Manajemen keuangan yang tidak dilakukan secara efektif
- e. Kurang edukasi dari pemerintah dalam sasaran dan tujuan dari dana bantuan yang diberikan

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian terkait adalah untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terkait yang diambil sebagai sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2021), skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Selama Pandemi Covid-19 Desa/Gampong Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana.Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pada data-data numerical (Angka) yang diolah dengan metode likert. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner (angket) serta dokumentasi. Dari hasil observasi bahwasanya selama 6 bulan berlangsung belum ada survey Kepuasan kepada Keluarga penerima BLT-Dana Desa. Berdasarkan Indikator Masyarakat Terhadap Pelayanan BLT-Dana Desa dikonversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi Kewajaran biaya= 3,55 dengan nilai Konversi 71 Nilai Bobot B. sedangkan Indikator yang memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi

adalah 4,71 dengan nilai konversi 94,2 dengan bobot “A” kategori “Sangat Setuju” sedangkan nilai terendah kepuasan adalah 3,55 dengan nilai konversi 71 dengan nilai bobot B, dan nilai terendah pelayanan adalah Kepastian Biaya adalah 2,38 dengan nilai konversi 47,6 dengan nilai bobot D.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Diana (2021), skripsi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam judul penelitian Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa bantuan sosial, pendampingan PKH, layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan komplementer tidak berpengaruh signifikan terhadap jaminan sosial, tetapi memiliki hubungan positif, sedangkan jaminan sosial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan serta memiliki hubungan positif.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Amin Haqiqi (2021), berjudul “Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pkh” diterbitkan oleh urnal Education and development Institut Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear

berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan dan konsumsi rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan baik secara simultan maupun parsial. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan dan konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga. Secara simultan pendapatan dan konsumsi rumah tangga secara bersama-sama mempengaruhi kesejahteraan keluarga sebesar 85.8% sedangkan sisanya 14.2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2019), jurnal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, berjudul Survei Tingkat Kepuasan Peserta Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sepinggian Kota Balikpapan. Jenis penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian campuran/kombinasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah peserta Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sepinggian yang berjumlah 174 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta pada program keluarga harapan adalah puas, dimana hasil nilai rata-rata nya 3,21, artinya bahwa terdapat kepuasan dalam bantuan yang diberikan program keluarga harapan selama ini pada peserta di Kelurahan

Sepinggan Kota Balikpapan. Perlunya meningkatkan Hak peserta di Kelurahan Sepinggan di Kota Balikpapan.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Talkah (2020),jurnal berjudul “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pkh Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. Metode penelitian adalah pendekatan kuantitatif analisis regresi linear sederhana. Hasil Terdapat pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t bahwa nilai Signifikansi (Sig.) sebesar 0.000 lebih kecil dari probabilitas 0.05

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Silvia (2021)	Metode kuantitatif. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pada data-data numerical (Angka) yang diolah dengan metode likert. Teknik pengumpulan data:kuesioner	Hasil pelitiannya menyatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi Kewajaran biaya= 3,55 dengan nilai Konversi 71 Nilai Bobot B. sedangkan Indikator yang memiliki nilai	Variabel bebas adalah kepuasan masyarkat. Metode kuantitatif dengan experimental	Variabel terikat: bantuan langsung tunai Lokasi penelitian di gampong Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		(angket) serta dokumentasi	<p>indeks kepuasan masyarakat tertinggi adalah 4,71 dengan nilai konversi 94,2 dengan bobot “A” kategori “Sangat Setuju” sedangkan nilai terendah kepuasan adalah 3,55 dengan nilai konversi 71 dengan nilai bobot B, dan nilai terendah pelayanan adalah Kepastian Biaya adalah 2,38 dengan nilai konversi 47,6 dengan nilai bobot D.</p>		
2	Diana (2021),	<p>Metode Kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran melalui kuesioner. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 orang Menggunakan Teknik</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa bantuan sosial pendamping PKH, layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan komplementer tidak berpengaruh signifikan terhadap jaminan sosial, tetapi memiliki hubungan positif,</p>	<p>Variabel bebas: program keluarga harapan. Metode analisis regresi berganda.</p>	<p>Variabel terikat: kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Lokasi penelitian: Desa Pante Garot Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie.</p>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		purposive sampling.	sedangkan jaminan sosial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan serta memiliki hubungan positif.		
3	Amin Haqiqi (2021)	Metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 62 responden. Teknik sampling menggunakan teknik Probability Sampling. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan teknik observasi dan kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan dan konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga. Secara simultan pendapatan dan konsumsi rumah tangga secara bersama-sama mempengaruhi kesejahteraan keluarga sebesar 85.8% sedangkan sisanya 14.2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti. Y.	Variabel terikat: kesejahteraan masyarakat. Metode analisis regresi linear berganda.	Variabel bebas: Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga
4.	Oktavia (2019)	Metode mixed methods research. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 174 orang yang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta pada PKH adalah puas, hasil nilai rata-rata nya 3,21, artinya bahwa	Variabel bebas: kepuasan PKH	Populasi sebanyak 174 orang yang tersebar dalam 37 RT. Lokasi: Balikpapan di Kelurahan Sepingg

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		tersebar dalam 37 RT.	terdapat kepuasan dalam bantuan yang diberikan PKH selama ini pada peserta.		
5	Lestari & Talkah (2020)	Metode kuantitatif. Metode analisis regresi linear sederhana. Sumber data: data primer dengan memberikan kuesioner	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Terdapat pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t bahwa nilai Signifikansi (Sig.) sebesar 0.000 lebih kecil dari probabilitas 0.05.	Variabel terikat: kesejahteraan masyarakat. Metode kuantitatif	Varibel bebas: Bantuan sosial PKH. Lokasi : Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Sumber: Data diperoleh (2023)

2.5 Kerangka Berpikir

2.5.1 Keterkaitan Kepuasan Layanan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Kepuasan layanan memiliki hubungan yang erat dengan kemaslahatan masyarakat, karena apabila kondisi kebutuhan dasar terpenuhi maka akan memberikan kualitas yang memuaskan untuk

masyarakat. Dalam konsep masalah pemenuhan kebutuhan manusia dapat mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyyat dengan bertujuan untuk menjaga akal, jiwa, keturunan, harta dan agama. Indikator kepuasan layanan bantuan sosial PKH menjadi tolak ukur dan penilaian tingkat kepuasan peserta seperti dari hak dan kewajiban peserta, penyaluran dananya, pelayanan pendamping serta penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan kebutuhan (Oktavia, 2019).

Keterkaitan kepuasan dengan kemaslahatan masyarakat adalah kepuasan dalam konvensional memaksimalkan kepuasan dalam mengkonsumsi barang dan jasa dengan memanfaatkan seluruh pendapatan yang dimiliki. Berbeda dengan Islam yang mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia hanya titipan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (dharuriyyat/primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Ghofur, 2020). Terpenuhinya suatu kebutuhan akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Misalnya, ketika seseorang menuntut ilmu maka ia akan mendapatkan atau merasakan masalah akal serta kepuasan melalui pendidikan tersebut. Berbeda dengan kepuasan (utility) yang bersifat individualis, masalah tidak hanya dirasakan individu. Masalah bisa jadi dirasakan selain konsumen atau dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Apabila kepuasan dalam memenuhi kebutuhan pokok (dharuriyyat/ primer) tidak terpenuhi maka akan

mengancam kehidupan atau timbul ketidakadilan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga akal, jiwa, agama, keturuanan dan harta, dikarenakan konsep masalah ditekankan pada semua aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat yang harus berpedoman dalam hukum syara' (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2022), mengatakan bahwa adanya pengaruh kepuasan layanan bansos terhadap kemaslahatan masyarakat mengalami peningkatan, dikarenakan masyarakat merasa puas atas program bansos yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan menurut penelitian lain mengatakan tidak ada pengaruh kepuasan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan yang dimana salah satu terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi (al-maslahah) tidak dapat dipisahkan dari harta seperti sandang, pangan, serta papan (Novia Suci, Rian Destiningsih, 2021).

2.5.2 Keterkaitan Program Layanan Publik Terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Pengelolaan dana bantuan haruslah benar-benar tertuju bagi daerah dan penduduk miskin jangan sampai terjadi dis-alokasi dan mis-alokasi. Karena tujuan dari kemaslahatan masyarakat, bahwasanya harus bisa diwujudkan guna untuk melindungi, mengayomi, mencukupi, dan memenuhi segala kebutuhan ummatnya. Pemerintah Indonesia sudah menjalankan apa yang telah disyariatkan Islam salah satunya dengan memberikan bantuan

sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja (Fahrudin, 2014).

Program layanan bansos berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan, dikarenakan bantuan PKH dan BLT Desa yang diberikan oleh pemerintah telah memenuhi sasaran dan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan perundang undangan tentang perlindungan sosial (Muharir, 2021). Sedangkan penelitian lainnya mengatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat, dikarenakan program layanan publik yang diberikan masih ada yang tidak tepat sasaran dan tidak diberikan tepat waktu (Syarif, 2022).

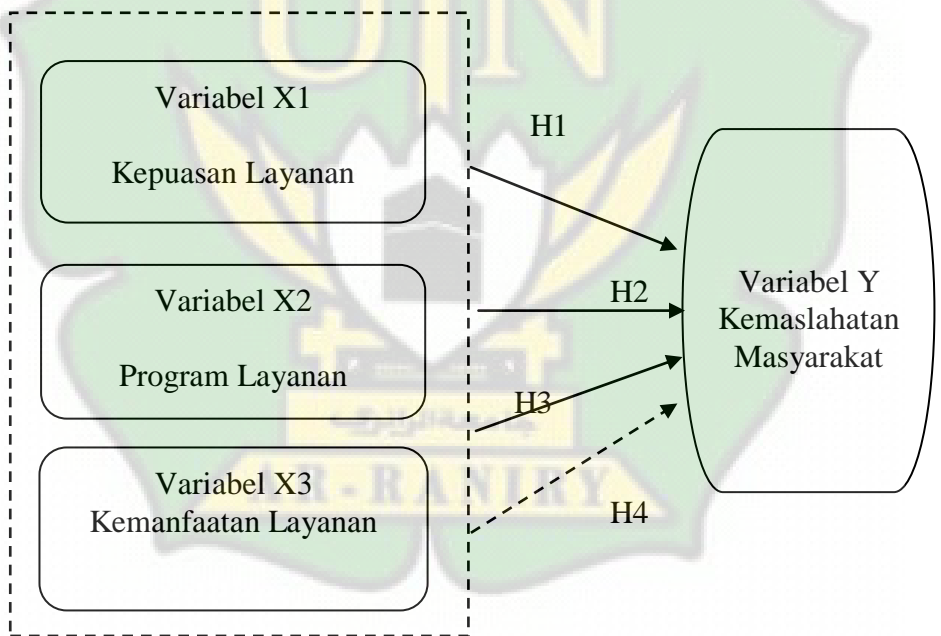
2.5.3 Keterkaitan Kemanfaatan Layanan Terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Kemanfaatan layanan adalah salah satu indikator yang berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan, kemanfaatan layanan publik yang baik akan dapat mensejahterakan masyarakat. Konsumen dapat merasakan adanya manfaat dari suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau material (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, 2013).

Menurut Haqiqi (2021), mengatakan bahwa adanya pengaruh positif kemanfaatan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan, dikarenakan mampu memberikan dampak dan dapat memberi kemanfaatan dari akses

kualitas pendidikan agar mampu meningkatkan kemaslahatan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Penelitian lain menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan kemanfaatan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan karena bentuk dari kemanfaatan program layanan belum dapat dirasakan oleh masyarakat (Kuntjorowati, 2018).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- > = Hubungan secara simultan
- > = Hubungan secara parsial

Kesimpulan dari kerangka berpikir di atas adalah bahwa penelitian yang ingin dibahas penulis terdiri dari empat variabel bebas (independent variable) dan satu variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas ada tiga variabel seperti kepuasan layanan (X1), program layanan publik(X2),kemanfaatan layanan publik (X3), dan kepuasan, pelayanan, kemanfaatan secara bersama-sama (X4), serta Kemaslahatan Masyarakat dalam kualitas pendidikan(Y) sebagai variabel terikat (dependent variable). Tujuan utama PKH adalah pada bidang pendidikan, karena dapat memutus rantai putus sekolah dengan cara memberikan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang memiliki anak usia sekolah yang digunakan untuk pendidikan sekolah anak.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan penelitian terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Kepuasan Layanan (X1) Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Dalam Kualitas Pendidikan (Y)

H₁: Kepuasan layanan berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan.

H₀: Kepuasan layanan tidak berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan.

2. Pengaruh Program Layanan Publik (X2) Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Dalam Kualitas Pendidikan (Y)

H₂: Program layanan publik berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan.

H₀: Program layanan publik tidak berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan.

3. Pengaruh Kemanfaatan Layanan Publik (X3) Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Dalam Kualitas Pendidikan (Y)

H₃: Kemanfaatan layanan publik berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan

H₀: Kemanfaatan layanan publik tidak berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan

4. Pengaruh Kepuasan (X1), Program Layanan (X2), dan Kemanfaatan (X3) Secara Bersama-Sama Terhadap Kualitas Pendidikan (Y)

H₄: Kepuasan (X1), Program layanan (X2), dan kemanfaatan (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas pendidikan (Y).

H₀: Kepuasan (X1), Program layanan (X2), dan kemanfaatan (X3) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan (Y).

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nanti berupa angka. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* yang digunakan untuk meneliti sampel dan populasi tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, analisis data bersifat statistik/kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif, karena kuantitatif deskriptif yakni penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pendekatan korelasi dari dua variabel atau lebih dalam satu variabel lain yang saling berhubungan (Sugiyono, 2018). Peneliti memilih penelitian kuantitatif karena didasarkan dari pengaruh empat variabel bebas (kemanfaatan, kepuasan, layanan, dan ketiga variabel tersebut secara bersama-sama) yang ingin dikaji dengan satu variabel terikat dalam kualitas pendidikan.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018), mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Jusuf (2012) menyatakan bahwa sampel yakni contoh, representan atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu satu bagian dari keseluruhan yang dipilih. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yakni teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja dan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang ada pada responden. Kriteria dari penelitian ini adalah warga miskin yang sudah terdata dalam kesejahteraan sosial dan ibu rumah tangga yang anaknya masih dalam tahap wajib belajar sampai 12 tahun (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 175 orang penerima bantuan sosial PKH (Kepala Desa, 2022). Sedangkan jumlah sampel ditentukan berdasarkan perhitungan dari rumus Slovin dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 1% dengan signifikansi sebesar 90%.

$$n = \frac{N}{1+(e)^2} \quad (3.1)$$

$$n = \frac{175}{1+175 (0,1)^2}$$

$$= 63,63$$

$$= 63,63 \text{ dibulatkan menjadi } 64$$

Keterangan :

N = Ukuran Populasi

n = Ukuran sampel

e = Margin of Error/ Tingkat Kesalahan

Kesimpulannya adalah bahwa populasi dalam penelitian ini digunakan untuk masyarakat desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara adalah 175 orang. Sedangkan berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh ukuran sampel *representive* yang diperlukan peneliti ini adalah sebanyak 64 orang. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan sampel, maka dalam penelitian ini yaitu 65 orang.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, dikarenakan data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan data primer karena penelitian yang digunakan berdasarkan studi lapangan yang didapatkan secara langsung dari masyarakat penerima bantuan sosial PKH Di Desa Lubuk Kertang Sumatera Utara dengan menggunakan kuesioner.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sarana pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan

masalah penelitian dari hasil studi lapangan dengan menggunakan kuesioner/angket. Kuesioner/angket yaitu teknik pengumpulan data yang cara memberikan atau memberikan kepada responden dengan harapan dapat memberikan jawaban atas daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner/angket dibagikan secara langsung kepada masyarakat penerima bantuan sosial PKH di desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Kuesioner yakni cara yang efektif untuk mengumpulkan data ketika peneliti mengetahui variabel yang akan diukur (Sugiyono, 2015).

Skala likert adalah digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial yang terjadi (Sugiyono, 2018). Skala pengukuran data yang peneliti gunakan adalah skala likert, karena alternatif yang digunakan untuk variabel kepuasan layanan, pelayanan publik, kemanfaatan layanan publik dan kemaslahatan masyarakat dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan masing-masing skor 1 hingga 5. Peneliti menyebarkan daftar pertanyaan kepada masyarakat desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau stimulus untuk menentukan hubungannya dengan segala suatu gejala yang diobservasi. Variabel bebas dalam penelitian ini ada dua variabel yakni kepuasan layanan (X1),

program layanan publik (X2), dan kemanfaatan layanan publik (X3).

3.5.2 Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikat adalah variabel yang dapat memberikan respon atau reaksi kalau dihubungkan dengan variabel bebas atau independen agar dapat mengukur pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel terikat dari penelitian ini adalah kemaslahatan masyarakat (Y). Untuk lebih memahami setiap variabel yang digunakan, maka diberikan definisi dari setiap variabel, yaitu :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Likert
1	Kepuasan Layanan (X1)	Indikator kepuasan layanan bantuan sosial PKH menjadi tolak ukur dan penilaian tingkat kepuasan peserta seperti dari hak dan kewajiban peserta, penyaluran dananya, pelayanan pendamping serta penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan kebutuhan (Oktavia, 2019).	1. Kepuasan layanan bantuan sosial 2. Bansos dapat membantu pendapatan 3. Bansos dapat membantu pendidikan anak. 4. Kepuasan pendidikan anak (Oktavia, 2019).	1-5
2	Program Layanan Publik (X2)	Indikator program layanan publik yakni dimensi berwujud ,keandalan, daya tanggap, jaminan kepastian dan empati	1. Pentingnya program layanan PKH 2. Program layanan diberikan tepat waktu 3. Kompensasi yang diterima dari	1-5

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Likert
		Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, 2011)	program layanan PKH 4. Program layanan publik digunakan untuk pendidikan. 5. Kehadiran anak harus lebih 80% dari program layanan pendidikan yang diberikan (Kemensos,2021).	
3	Kemanfaatan Layanan Publik (X3)	Kemanfaatan layanan publik adalah kegiatan pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang dapat mendukung tercapainya tujuan PKH tersebut. Dalam bidang pendidikan, dana yang didapatkan oleh keluarga penerima PKH dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak seperti membeli seragam sekolah, perlengkapan sekolah, biaya dan tabungan sekolah	1. Kemanfaatan layanan fasilitas pendidikan 2. Kemanfaatan layanan unuk kebutuhan pendidikan 3. Kemanfaatan layanan publik bagi penerima 4. Kemanfaatan layanan pendidikan sebaik-baiknya (Kemensos, 2021).	1-5

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Likert
		(Kemensos, 2021).		
4	Kemaslahatan masyarakat (kualitas pendidikan) (Y)	Kemaslahatan masyarakat (maqashid syariah) adalah tujuan untuk mencari keridhaan Dan Ketetapan Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat dalam memneuhi kebutuhan dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) serta tahsiniyyat (tersier) (Karim, 2012).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib belajar selama 12 tahun 2. Pemenuhan kebutuhan sekolah anak 3. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak 4. Bansos dapat membantu kebutuhan pokok 5. Penerima memiliki tempat tinggal yang layak (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, 2019). 	1-5

Sumber: Data diperoleh (2023)

3.6 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

3.6.1 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas ukuran yang menunjukkan tinggi suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, kerana reabilitas menyangkut ketepatanalat ukur agar benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji dengan berkali-kali. Sedangkan hasil reabilitas dalam bantuan SPSS akan menghasilkan Cronbach Alpha, maka instrumen yang

dikatakan reliabel (andal) bila memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,60 (Ghozali, 2016).

3.6.2 Uji Validitas

Validitas alat ukur sama pentingnya dengan realibilitas, karena memiliki akurasi yang baik untuk meningkatkan validitas kebenaran data yang diinginkan penelitian menggunakan alat ukur kuesioner. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} di tabel correlations pada total pearson correlations untuk tiap variabel r_{tabel} dengan ketentuan *degree freedom* ($df = n - k$), dimana jumlah sampel yang digunakan (k) pada variabel independennya jumlah sampel (n) pada tingkat signifikan 0,05 dengan ketentuan adalah sebagai berikut ;

- a. $r_{hitung} > r_{tabel}$, menyatakan bahwa analisis tersebut dinyatakan valid.
- b. $r_{hitung} < r_{tabel}$, menyatakan bahwa analisis tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2016).

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016), menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *variance inflation factor* yang tinggi ($VIF = 1 / \text{Tolerance}$). Nilai *cut off* pada umumnya

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yakni nilai tolerance $< 0,10$ atau = nilai VIF > 10 .

3.7.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode regresi yang baik yakni memiliki distribusi yang mendekati normal atau data normal. Uji normalitas data dari penelitian ini adalah dilihat dari nilai signifikan di bagian Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, karena data yang diuji lebih besar dari 50 dan data yang diuji lebih kecil dari 50. Oleh karena itu, peneliti menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro Wilk (Ghozali, 2011).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sarjono dan Julianita (2013), mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas pada variabel tabel tidak sama untuk semua pengamat. Jika varian residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik merupakan terjadi homoskedastisitas dalam model atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai absolut residul (e) dimana:

- a. Nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka terjadi gejala heteroskedastisitas.
- b. Nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka terjadi gejala heteroskedastisitas

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Model regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bentuk persamaan yang paling sederhana dari regresi linear berganda merupakan dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Model persamaan dari regresi linear berganda, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

(3.2)

Keterangan:

Y	= Kemaslahatan masyarakat (kualitas pendidikan)
X1	= Kepuasan layanan
X2	= Program layanan publik
X3	= Kemanfaatan layanan publik
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisiensi regresi
e	= Error term
α	= Konstanta

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji T

Menurut Ghazali (2011), menyatakan bahwa uji parsial bertujuan agar memastikan variabel bebas secara individu

berpengaruh terhadap nilai variabel terikat, karena pada dasarnya satu variabel bebas secara individu menerangkan suatu variabel terikat. Setelah menghitung nilai t langkah selanjutnya membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai tabel student t dengan $dk = (n-1)$ dan taraf nyata 5%.Ketentuan-ketentuan dari pengujian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kalau probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b. Kalau probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ atau nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.9.2 Uji Statistik F (Uji Simultan)

Secara bersamaan variabel bebas (X_1, X_2, X_3) atau hipotesis pertama yang akan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengujian dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan ketentuan-ketentuan, yaitu:

- a) Kalau signifikansi (probabilitas) $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima
- b) Kalau signifikansi (probabilitas) $> 0,05$, atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.9.3 Koefisiensi Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016), menyatakan bahwa koefisiensi determinasi (R^2) yakni antara nol dengan satu. Jika R^2 yang kecil akan menyebabkan variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabelnya sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati angka

satu akan menyebabkan variabel bebas mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi

Menurut BPS (2020), lokasi penelitian ini adalah Desa Lubuk Kertang yang terletak di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Luas wilayah Kecamatan Brandan Barat Desa Lubuk Kertang adalah 11,070 Ha (110,7 Km²), dengan 7 desa/kelurahan. Adapun batas-batas wilayah kecamatan brandan barat, yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pangkalan Susu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sei Lapan
- Sebelah Barat : Kecamatan Besitang
- Sebelah Timur : Kecamatan Babalan & Selat Malaka

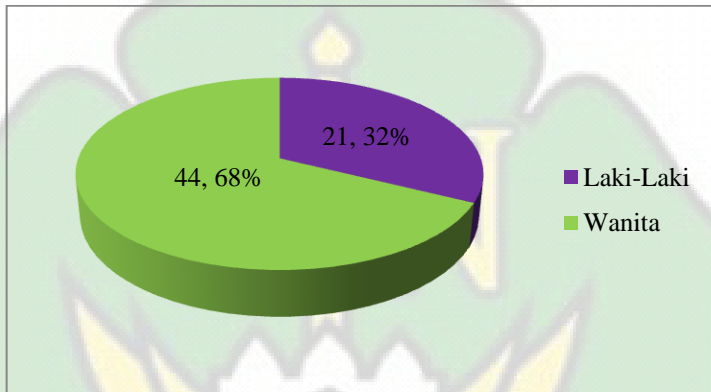
4.2 Gambaran Responden Penelitian

Responden dari penelitian ini yakni penerima bantuan sosial program keluarga harapan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat . Pada karakteristiknya terdapat beberapa data diri pribadi yang harus diisi oleh responden seperti usia dan pendapatan perbulan. Adapun deskripsi dari karakteristik reponden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah salah satu yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel penelitian. Gambaran umum yang dijadikan responden dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar 4.1, yaitu:

Gambar 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



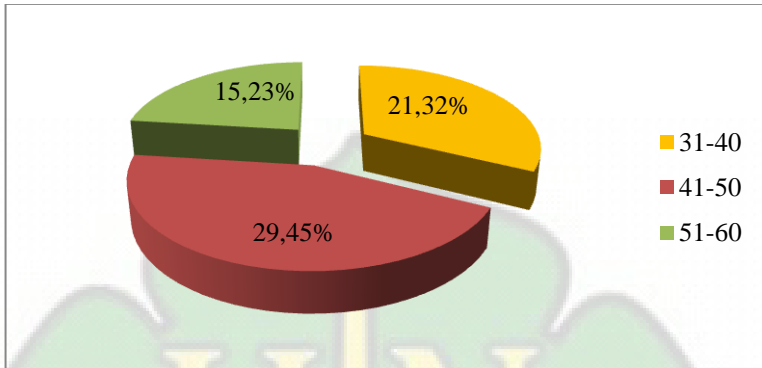
Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin sebagian didominasi oleh wanita sebanyak 44 orang (44,68%) dan laki-laki sebanyak 21 orang (21,32%)

4.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Usia yakni salah satu kriteria dalam pengambilan sampel penelitian. Gambaran umum yang dijadikan responden dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar 4.2, yakni:

Gambar 4.2
Responden Berdasarkan Usia



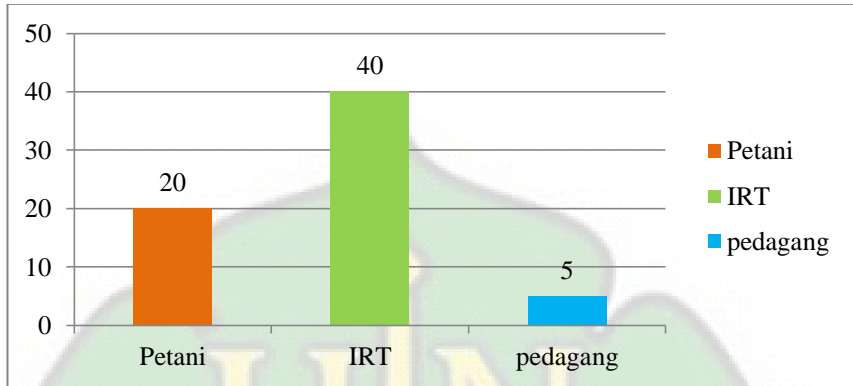
Sumber: Data Diolah dari SPSS (2023)

Pada gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa rentang usiadari 65 adalah sebagian besar yang di dominasi oleh usia 41-50 tahun sebesar 29 orang (29,45%), selanjutnya responden dengan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 21 orang (21,32%), serta responden dengan rentang usia 51-60 tahun sebanyak 15 orang (15,23%).

4.2.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan adalah salah satu kriteria dalam pengambilan sampel penelitian. Gambaran umum yang dijadikan dalam responden dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar 4.3, yaitu:

Gambar 4.3
Responden Berdasarkan Pekerjaan



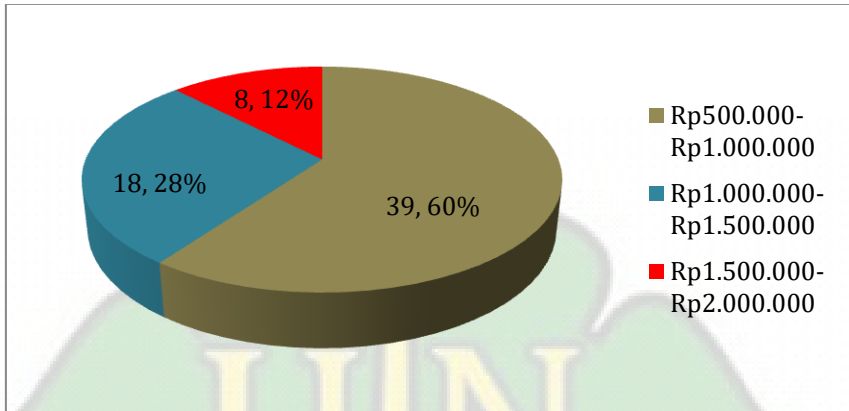
Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan pekerjaan adalah sebagian bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 40 orang, selanjutnya petani sebanyak 20 orang dan pedagang sebanyak 5 orang dari 65 responden.

4.2.4 Responden Berdasarkan Pendapatan (Bulan)

Karakteristik kepala keluarga penerima bantuan sosial PKH adalah salah satu kriteria dalam pengambilan sampel penelitian. Gambaran umum yang dijadikan responden dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.4, yaitu:

Gambar 4.4
Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan



Sumber: Data Diolah (2023)

Pada gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden pendapatan perbulan kepala keluarga dari 65 adalah sebagian besar didominasi sebesar Rp500.000-Rp1.000.000 sebanyak 39 orang (39,60%), lalu responden pendapatan perbulan kepala keluarga sebesar Rp1.000.000-Rp1.500.000 sebanyak 18 orang (18,28%), serta responden pendapatan kepala keluarga sebesar Rp1.500.000-Rp2.000.000 sebanyak 8 orang (8,12%).

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan data secara statistik dari penelitian ini yakni kepuasan pelayanan, pelayanan publik, kemanfaatan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat. Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada nilai *mean* (rata-rata) dan *standar deviation* (simpang baku),

nilai *minimum* serta *maximum* dari semua variabel yang ditunjukkan dalam tabel 4.5,yaitu:

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif

	<i>N</i> <i>Statistic</i>	<i>Minimum</i> <i>Statistic</i>	<i>Maximum</i> <i>Statistic</i>	<i>Mean</i>		<i>Std.</i> <i>Deviation</i> <i>Statistic</i>
				<i>Statis</i> <i>tic</i>	<i>Std.</i> <i>Error</i>	
Kepuasan Layanan	65	15	20	20,00	17,60	1,497
Program Layanan	65	18	25	21,27	0,226	1,824
Kemanfaatan Layanan	65	16	20	17,80	0,195	1,568
Kemaslahatan Masyarakat	65	18	25	22,07	0, 229	1,853
Valid N (listwise)	65					

Sumber: Data diolah dari SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan variabel kepuasan layanan (X1), pelayanan publik (X2), kemanfaatan layanan (X3), terhadap kemaslahatan masyarakat (Y), maka dijabarkan secara detail sebagai berikut:

- Variabel kepuasan layanan dengan nilai minimum sebesar 15, maksimum sebesar 20, mean sebesar 20,00 dan standar deviasi sebesar 1,497. Hal tersebut mengatakan bahwa nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga mengindikasikan hasil yang cukup baik. Dikarenakan standar deviasi yakni pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

- Variabel program layanan dengan nilai minimum sebesar 18, maksimum sebesar 25, nilai mean 21,27 dan standar deviasi sebesar 1,824. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi, sehingga hasilnya cukup baik. Dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil normal.
- Variabel kemanfaatan layanan dengan nilai minimum sebesar 16, maksimum sebesar 20, mean sebesar 17,80 dan standar deviasi sebesar 1,568. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, sehingga hasilnya baik. Dikarenakan standar deviasi yakni pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga hasil penyebaran data menunjukkan normal.
- Variabel kemaslahatan masyarakat dengan nilai mean sebesar 18, maksimum sebesar 25, mean sebesar 22,07 dan standar deviasi sebesar 1,853. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai mean lebih besar daripada standar deviasi. Dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga hasil penyebaran data menunjukkan normal.

4.4 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

4.4.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggambarkan bahwa sejauh mana alat ukur tersebut memberikan hasil yang relatif tidak berbeda

dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama. Uji reliabilitas yang dilakukan pada semua pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada 65 orang responden. Setiap item pertanyaan akan dinyatakan reliabel kalau *Cronbach's Alpha* > 0,6%. Hasil uji reliabel dapat dijelaskan pada tabel 4.6, yaitu:

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Reabilitas Coefficients	Cronbach's Alpa	Keterangan
1	Kepuasan layanan	4 item pertanyaan	0,673	Reliabel
2	Program Layanan	5 item pertanyaan	0,637	Reliabel
3	Kemanfaatan layanan	4 item pertanyaan	0,797	Reliabel
4	Kemaslahatan Masyarakat	5 item pertanyaan	0,685	Reliabel

Sumber: Data diolah dari SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel 4.6 mengatakan bahwa masing-masing nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari r tabel yakni 0,60. Hal ini menyatakan bahwa secara keseluruhan item pertanyaan sudah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

4.4.2 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk melihat keabsahan (kevalidan) setiap pernyataan dalam kuesioner. Dalam penentuan valid atau tidaknya item pertanyaan adalah membandingkan r hitung dengan r tabel yang dimana $df = n-3$ dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan $n = 65$, sehingga dalam penelitian diperoleh r tabel = 0,2441.

Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dikatakan valid. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka dilakukan uji validitas dengan menggunakan program SPSS, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Layanan

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Keterangan
Kepuasan layanan	X1.1	0,762	0,244	Valid
	X1.2	0,657	0,244	Valid
	X1.3	0,732	0,244	Valid
	X1.4	0,700	0,244	Valid

Sumber: Data diolah dari SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat seluruh item pertanyaan dinyatakan valid kalau nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ dengan jumlah responden 65 orang. Maka semua item pertanyaan variabel kepuasan pelayanan telah memenuhi uji validitas dan dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Program Layanan

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Keterangan
Program Layanan Publik	X2.1	0,683	0,244	Valid
	X2.2	0,673	0,244	Valid
	X2.3	0,728	0,244	Valid
	X2.4	0,580	0,244	Valid
	X2.5	0,593	0,244	Valid

Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada variabel program layanan dari 65 kuesioner

dapat dinyatakan valid karena semua item pertanyaan memiliki r hitung $>$ r tabel, dengan hasil r tabel 0,244

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Kemanfaatan Layanan

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Keterangan
Kemanfaatan Layanan	X3.1	0,808	0,244	Valid
	X3.2	0,807	0,244	Valid
	X3.3	0,787	0,244	Valid
	X3.4	0,752	0,244	Valid

Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas mengatakan bahwa semua item pertanyaan kuesioner variabel kemanfaatan layanan dapat dinyatakan valid karena semua item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0,244).

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Kemaslahatan Masyarakat

Variabel	Item Pertanyaan	Corrected Item Total Correlation (r Hitung)	r Tabel	Keterangan
Kemaslahatan Masyarakat	Y1	0,546	0,244	Valid
	Y2	0,624	0,244	Valid
	Y3	0,707	0,244	Valid
	Y4	0,708	0,244	Valid
	Y5	0,744	0,244	Valid

Sumber: Data diperoleh dari SPSS(2023)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas mengatakan bahwa semua item pertanyaan pada variabel kemaslahatan masyarakat dapat dikatakan valid karena semua item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (2,44).

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah diuji untuk melihat *Variance Inflation Factor*(VIF) dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau $VIF > 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas (non multikolinearitas). Pengujian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikonearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kepuasan layanan	0,625	1,599	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Program Layanan	0,563	1,775	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
Kemanfaatan layanan	0,876	1,141	Tidak terjadi gejala multikolinearitas

Sumber: Data diolah dari SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas bernilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,1$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dari kepuasan layanan (X1), pelayanan publik (X2), kemanfaatan layanan (X3) tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4.5.2 Uji Normalitas

Dalam uji normalitas dilakukan uji statistik *One Sample Kolmogrov-Smirnov* dengan tingkat signifikan 5% (0,05). Dengan ketentuan nilai Asymp. Sig. (2 tailed) $> 0,05$, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov, yaitu:

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas Dengan One Sample Kolmogrov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50691204
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.053
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,200 > 0,05 dengan jumlah responden 65 orang. Data penelitian tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas mengatakan bahwa varians tidak sama untuk semua pengamat. Kalau varians residul suatu pengamatan lain tetap maka disebut homokedasitas. Metode dalam penelitian ini menggunakan uji metode glejser. Dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai absolut residul (e) dimana:

- a. Nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas.
- b. Niali probabilitas signifikan > 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.775	1.724		1.030	.307
	Kepuasan Layanan	.084	.093	.145	.904	.369
	Program Layanan	-.077	.081	-.162	-.959	.341
	Kemanfaatan Layanan	-.022	.075	-.040	-.295	.769

Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Dari tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan dari setiap variabel ($X_1 = 0,369$, $X_2 = 0,341$, $X_3 = 0,769$) $> 0,05$, sehingga data tersebut menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena model regresinya yang ideal dan baik dapat terpenuhi.

4.6 Hasil Analisis Data

Analisis regresi berganda dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas kepuasan pelayanan (X_1), Program layanan (X_2), kemanfaatan layanan (X_3) terhadap variabel dependen kemaslahatan masyarakat (Y). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.530	3.007		1.839	.071
	Kepuasan Layanan	.269	.163	.218	1.652	.104
	Program layanan	.166	.141	.164	1.180	.242
	Kemanfaatan Layanan	.465	.131	.393	3.537	.001

Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda, yaitu:

$$Y = 5,530 + 0,269 X_1 + 0,166 X_2 + 0,465 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan dari hasil analisis regresi linear berganda diatas, yaitu:

1. Nilai konstanta (α) positif sebesar 5,530 yang menunjukkan pengaruh positif variabel bebas kepuasan layanan, pelayanan publik, dan kemanfaatan layanan. Jika variabel bebas berpengaruh atau naik dalam satu satuan, maka variabel kemaslahatan masyarakat akan terpenuhi atau naik.
2. Koefisiensi b_1 sebesar 0,269 untuk variabel kepuasan pelayanan yang bernilai positif, mengatakan bahwa apabila nilai X_1 mengalami kenaikan sebesar satu, sedangkan variabel bebas lainnya bersifat tetap, maka nilai Y akan mengalami peningkatan juga sebesar 0,269.
3. Koefisien regresi program layanan (X_2) bernilai positif sebesar 0,166, apabila nilai X_2 mengalami kenaikan sebesar

satu, sementara variabel lainnya bersifat tetap, maka kemaslahatan masyarakat juga cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,166.

4. Koefisien regresi kemanfaatan layanan (X_3) bernilai positif sebesar 0,465, apabila nilai X_3 mengalami kenaikan sebesar satu, sementara variabel bebas lainnya bersifat tetap, maka Y akan juga mengalami peningkatan sebesar 0,465.

4.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan ketentuan, kalau hipotesis diterima atau ditolak maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sementara kalau probabilitas $>$ 0,05 maka H_0 diterima
- 2) Jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sementara kalau probabilitas $<$ 0,05 maka H_0 ditolak.

4.7.1 Uji T

Uji parsial bertujuan untuk memastikan apakah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi linear berganda secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan T tabel yang bertaraf signifikan sebesar 0,05 dan

derajat kebebasan (DK) $N - 3, 65 - 3 = 62$, maka nilai t tabel sebesar 1,998. Adapun hasil uji parsial secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.530	3.007		1.839	.071
	Kepuasan Layanan	.269	.163	.218	1.652	.104
	Program layanan Publik	.166	.141	.164	1.180	.242
	Kemanfaatan Layanan	.465	.131	.393	3.537	.001

Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji t di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kepuasan Layanan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh t hitung $1,652 < t$ tabel 1,998, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, karena tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat. Besarnya pengaruh kepuasan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat hanya sebesar 1,652 dan tidak signifikan, karena tingkat signifikannya $0,104 > 0,05$.

b. Program Layanan

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas t hitung $1,180 < t$ tabel 1,998, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan publik terhadap kemaslahatan masyarakat.

besarnya pengaruh program layanan publik terhadap kemaslahatan masyarakat hanya sebesar 1,180 dan tidak signifikan, karena tingkat signifikan $0,242 > 0,05$.

c. **Kemanfaatan Layanan**

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel kemanfaatan layanan (X3) sebesar 3,537 yang lebih besar dari t_{tabel} 1,998 sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,537 > 1,998$) dengan probabilitas signifikan $0,001 < 0,05$. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak, karena variabel kemanfaatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat.

4.7.2 Uji Statistik F (Simultan)

Uji F (simultan) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan angka signifikan. Adapun hasil uji F dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74.424	3	24.808	10.413	.000 ^b
	Residual	145.330	61	2.382		
	Total	219.754	64			

Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 10,413 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,75 dan probabilitas signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak

dan H1 diterima, maka dari setiap variabel bebas kepuasan pelayanan (X1), program layanan publik (X2), dan kemanfaatan layanan (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan.

4.7.3 Koefisiensi Determinasi (R²)

Uji koefisiensi determinasi (R₂) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Pada persamaan regresi rentan terhadap penambahan variabel bebas, dimana semakin banyak variabel bebas yang terlibat, maka semakin besar nilai R² pada analisis regresi berganda. Nilai koefisien determinasi digunakan R square, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Hasil Koefisiensi Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.582 ^a	.339	.306	1.54352

Sumber: Data diperoleh dari SPSS (2023)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 5.17 menyatakan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,339 (33,9%). Dapat disimpulkan bahwa 33,9% variabel kepuasan layanan, program layanan publik, dan kemanfaatan layanan (variabel bebas) dapat dipengaruhi oleh variabel terikat (kemaslahatan masyarakat). sedangkan sisanya

sebesar 66,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh Kepuasan Layanan PKH Terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa kepuasan layanan memiliki nilai t hitung sebesar $1,652 < t$ tabel $1,998$. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa pengaruh kepuasan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat hanya sekitar $1,652$ yang dimana hubungan tersebut masih sangat lemah atau tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat karena tingkat signifikan $0,104 > 0,05$.

Penyebab dari lemahnya hubungan kepuasan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat dikarenakan rata-rata peserta penerima PKH memiliki 3 orang anak yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pendidikan PKH. Akan tetapi, jumlah yang diberikan pemerintah sebesar Rp400.000 tidak tepat waktu, sedangkan rata-rata keluarga sangat miskin di Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat paling banyak memiliki anak SD sebanyak 40 siswa.

Keterkaitan kepuasan dengan kemaslahatan masyarakat adalah kepuasan dalam konvensional memaksimalkan kepuasan dalam mengonsumsi barang dan jasa dengan memanfaatkan

seluruh pendapatan yang dimiliki. Berbeda dengan Islam yang mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia hanya titipan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (dharuriyyat/primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Ghofur, 2020). Terpenuhinya suatu kebutuhan akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan. Misalnya, ketika seseorang menuntut ilmu maka ia akan mendapatkan atau meraskan masalah akal serta kepuasan melalui pendidikan tersebut. Berbeda dengan kepuasan (utility) yang bersifat individualis, masalah tidak hanya dirasakan individu. Masalah bisa jadi dirasakan selain konsumen atau dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Apabila kepuasan dalam memenuhi kebutuhan pokok (dharuriyyat/ primer) tidak terpenuhi maka akan mengancam kehidupan atau timbul ketidakadilan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga akal, jiwa, agama, keturunan dan harta, dikarenakan konsep masalah ditekankan pada semua aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat yang berpedoman dalam hukum syara' (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, 2019)

Kepuasan layanan memiliki hubungan yang erat dengan kemaslahatan masyarakat, karena apabila kondisi kebutuhan dasar terpenuhi maka akan memberikan kualitas yang memuaskan untuk masyarakat. Penelitian ini sesuai dengan yang diteliti Novia Suci & Rian Destiningsih (2021), mengatakan bahwa tidak ada pengaruh

kepuasan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat yang dimana salah satu terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi (al-maslahah) tidak dapat dipisahkan dari harta seperti sandang, pangan, serta papan. Sedangkan menurut penelitian lain Ramadhan (2022), mengatakan bahwa adanya pengaruh kepuasan layanan bansos terhadap kemaslahatan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 69,3%, dikarenakan masyarakat merasa puas atas program bansos yang diberikan oleh pemerintah.

4.8.2 Pengaruh Program Layanan Publik PKH Secara Parsial Terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa Program layanan publik memiliki nilai t hitung sebesar 1,180 yang lebih kecil dari t tabel 1,998. Perbandingan nilai signifikannya dengan tingkat kesalahan sebesar 0,05 adalah $0,242 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yakni adanya hubungan yang lemah atau tidak dapat memberikan pengaruh antara pelayanan publik terhadap kemaslahatan masyarakat sebesar 1,180 dengan tingkat signifikan sebesar $0,242 > 0,05$.

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa program layanan publik memiliki pengaruh sebesar 0,166 terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan jika program layanan publik mengalami peningkatan sebesar satu diprediksikan akan mengalami peningkatan kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan

sebesar 0,166 dengan asumsi bahwa variabel independen yang tidak terdapat dalam model regresi adalah tetap. Kesimpulannya adalah kalau dilihat dari analisis regresi linear berganda kemaslahatan masyarakat di desa lubuk kertang kecamatan brandan barat dipengaruhi oleh program layanan publik.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarif (2022), mengatakan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat, dikarenakan program layanan publik yang diberikan masih ada yang tidak tepat sasaran dan tidak diberikan tepat waktu. Penelitian lain menyatakan bahwa program layanan bansos berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat, dikarenakan bantuan PKH dan BLT Desa yang diberikan oleh pemerintah telah memenuhi sasaran dan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan perundang undangan tentang perlindungan sosial(Muharir, 2021).

4.8.3 Pengaruh Kemanfaatan Layanan PKH Terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa kemanfaatan layanan memiliki nilai t hitung sebesar 3,537 dan lebih besar dari t tabel 1,998. Perbandingan nilai signifikannya dengan tingkat kesalahan sebesar 0,05 adalah $0,001 < 0,05$. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan layanan memiliki pengaruh positif terhadap kemaslahatan masyarakat. Dari hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa kemanfaatan layanan memiliki pengaruh sebesar 0,465 terhadap kemaslahatan

masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa kalau kemanfaatan layanan mengalami peningkatan sebesar satu diasumsikan akan meningkatkan kemaslahatan masyarakat sebesar 0,465 dengan variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Dapat disimpulkan bahwa bansos bermanfaat bagi penerima akan tetapi belum optimal atau masyarakat tidak puas terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat dipengaruhi oleh kemanfaatan layanan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi (2021), mengatakan bahwa adanya pengaruh positif kemanfaatan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat dikarenakan mampu memberikan dampak dan dapat memberi kemanfaatan dari akses kualitas pendidikan agar mampu meningkatkan kemaslahatan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Penelitian lainnya mengatakan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan kemanfaatan layanan terhadap kemaslahatan masyarakat karena bentuk dari kemanfaatan program layanan belum dapat dirasakan oleh masyarakat (Kuntjorowati, 2018)

4.8.4 Keterkaitan Bantuan Sosial PKH Dalam Kemaslahatan Masyarakat

Menurut Auda (2014), menjaga harta (hifdzu mal) adalah salah satu prinsip perlindungan harta oleh agama atau permasalahan dasar perekonomian negara yang segala kebijakan manusia harus mampu memberikan rasa aman dan tenang sehingga

dapat menjalankan kehidupan dengan baik, termasuk dalam perekonomian. Menurut Satjipto Raharjo, bentuk perlindungan hukum islamnya dengan memenuhi hak asasi masyarakat yang perlindungannya diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Al-Ghazali, hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan maslahat agar dapat memenuhi lima aspek yakni terjaganya akal, jiwa, agama, harta dan keturunan. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim karakteristik khusus dari hukum Islam untuk kehidupan manusia yang pada dasarnya bersifat adil dan menuju kebaikan untuk kehidupan (Ika Yunia, 2015).

Dari sisi cakupan, kemaslahatan terbagi menjadi kuliyyat dan juz'iyat, berarti kemaslahatan bagi orang banyak dan maslahat bagi individu. Dilihat dari dua cakupan tersebut menurut peneliti kebijakan penyaluran bansos PKH terbagi dalam dua kategori, yakni kebutuhan untuk pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara merata pada masyarakat prasejahtera yang berhak menerima bansos, dan maslahat universal. Akan tetapi, perlindungan terhadap masyarakat yang berada di posisi paling rentan harusnya menjadi prioritas utama yang diberikan jaminan sosial sebagai penerima bansos dan nasabah bank juga sebagai konsumen lembaga keuangan maka harus diberi rasa aman atas harta yang menjadi haknya serta dapat diregulasikan menjadi dasar mekanisme penyaluran bansos PKH.

Perlindungan terhadap penerima bansos adalah tuntunan ajaran Islam. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِأَلْطِيفٍ صَلِّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ
 حُوبًا كَبِيرًا [٢]

Artinya: “ Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa), harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (QS. An- Nisa{4}: 2).

Ekonomi Islam berprinsip mewujudkan keseimbangan dan keadilan secara proposional antara kepentingan umat dan kepentingan individu. Dilihat dari sudut pandang seperti itu dapat membentuk kemaslahatan individu, seharusnya penyaluran bansos PKH dapat diregulasikan agar dapat memenuhi rasa aman dalam proses penyaluran bansos PKH, sedangkan untuk kemaslahatan umum adalah penyaluran bansos yang diberikan harus merata (Izzan, 2006).

Menurut penelitian Muharir (2021) dan Hasan (2017), mengatakan bahwa adanya pengaruh program keluarga harapan terhadap kemaslahatan masyarakat karena program jaminan tersebut berdasarkan prinsip keadilan, takaful dan bertanggung jawab yang sesuai dengan nilai dasar ekonomi Islam. Pendamping bertanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan PKH selama berlangsung dan pemerintah mengeluarkan jaminan pendidikan maupun kesehatan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Sesuai dengan penelitian diatas, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa kemanfaatan layanan adalah faktor yang mempengaruhi kemaslahatan masyarakat hal ini dapat dilihat dari nilai positif dan signifikan antara kemanfaatan terhadap kemaslahatan masyarakat. Karena secara kepuasan dan program layanan publik yang diberikan PKH di Desa Lubuk Kertang belum optimal atau masyarakat tidak merasa puas, akan tetapi secara kemanfaatan PKH bermanfaat untuk masyarakat tersebut. Berdasarkan kemanfaatan layanan yang terdapat dalam kemaslahatan masyarakat dapat mampu memenuhi kebutuhan primer dari menjaga harta dan akal.

1. Kemanfaatan layanan dalam menjaga harta (hifdz mal), seperti memanfaatkan harta dari bantuan sosial yang diberikan berupa uang tunai maupun non tunai untuk kebutuhan sekolah anak, misalnya membeli baju, sepatu, tas dan kebutuhan dasar lainnya, selain itu dapat meringankan beban pengeluaran biaya pendidikan anak serta pengelolaan dana yang telah diberikan untuk memenuhi hak maupun kewajiban KPM.
2. Kemanfaatan layanan dalam menjaga akal (hifdzu aql) yang dapat dilihat dari adanya bantuan khusus dalam pendidikan anak sehingga terjaganya akal dalam berfikir cemerlang. Pendidikan yang diberikan secara gratis mampu meningkatkan taraf pendidikan anak, kalau dulu orangtuanya hanya tamat SD atau bahkan tidak sekolah,

sekarang anaknya dapat menyelesaikan pendidikan sampai SMA ataupun bahkan lebih memiliki motivasi dan minat dalam belajar (Izzan, 2006).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis pengaruh bantuan sosial program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara dalam kualitas pendidikan dengan sampel 65 responden. Terdapat variabel kepuasan layanan, program layanan publik dan kemanfaatan layanan sebagai variabel bebas terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam sebagai variabel terikat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Variabel kepuasan layanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.
- 2) Variabel program layanan publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.
- 3) Variabel kemanfaatan layanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.

- 4) Variabel kepuasan layanan, program layanan publik, kemanfaatan layanan secara simultan berpengaruh positif (signifikan) terhadap kemaslahatan masyarakat dalam kualitas pendidikan di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Sumatera Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pendamping bantuan sosial PKH perlu dilakukan pengawasan dan pemahaman kepada penerima PKH agar uang yang diterima dari bantuan sosial PKH digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan PKH. Diharapkan dapat meningkatkan komponen hak yang diterima oleh KPM agar dapat menunjang kehidupan KPM kearah yang lebih baik, dan meningkatkan komponen hak penerima PKH yang lebih baik lagi.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk diperbaharui dan dikembangkan lebih sempurna lagi mengenai bantuan sosial PKH terhadap kemaslahatan masyarakat dengan memberikan bantuan pendidikan yang tepat sasaran agar masyarakat perekonomian ke bawah tidak harus putus sekolah.
3. Diharapkan kepada pemerintah melakukan pendataan ulang bagi calon peserta PKH yang sesuai prosedur, mengedepankan kepentingan masyarakat miskin agar

tercipta keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan diberikan bantuan sosial dengan tepat waktu supaya masyarakat merasa puas akan pelayanan publik yang diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2016). *Tafsir Al-Quran*. Darul Haq.
- Amin Haqiqi, & W. T. (2021). Pengaruh pendapatan dan konsumsi rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat bantuan sosial pkh. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 484–493.
- Auda, J. (2014). *Memahami Maqashid Syariah*. PTS Islamika.
- Azharsyah, Ibrahim, D. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia.
- Azwar, S. (2008). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2021, October 14). Pendidikan Sumatera Uta. *Ka*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/1476-jiwa-penduduk-sumatera-utara-berpendidikan-s3-pada-juni-2021>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2022, March 21). *Jumlah Penduduk Miskin*. <https://www.bps.go.id/>
- BPS. (2020). *KECAMATAN BRANDAN BARAT DALAM ANGKA 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.
- BPS. (2022). *BI Rate*. Badan Pusat Statistik.
- Diana, A. (2021). *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)*.
- Djazuli, A. (2010). *Kaidah- Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Kencana.

- Dukta, A. (2008). *AMA Hand Book For Customer Satisfaction*. NTC Business Book.
- Fahrudin. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Firmansyah, A. (2018). *Pengantar Manajemen. Edisi ke-1*. Deepublish.
- Fitralisma, G., & Ernitawati, Y. (2021). Kualitas Pelayanan Aparatur Desa Saat Situasi Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dari Kementerian Desa. *Maker: Jurnal Manajemen*, 7(2), 168–175. <https://doi.org/10.37403/mjm.v7i2.363>
- Ghofur, A. (2020). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23*. Universitas Diponegoro.
- Gucandra, Y. (2021). Pendidikan Islam sebagai Instrumen Maqashid Al Syariah (Studi Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-Rasuli). *Homepage*, 08(2), 1–17.
- Hasan, N. F. (2017). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(4), 1–18.
- Hernanik. (2017). PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN PADA RUMAH TANGGA. *Media Publikasi Ilmiah*, 5 Nomor 1, 38–

57.

- Ika Yunia, & A. K. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid Al-Ssyariah*. PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Izzan, A. (2006). *Ayat-Ayat Al-Quran yang Berdimensi Economi*. Remaja Rosdakarya.
- Jannah, C. (2022, May 28). *Bansos dan Kartu Prakerja Tidak Tepat Sasaran, Apa Akar Masalahnya?*
- Jauhar. (2013). *Maqashid Syariah*. Amzah.
- Jusuf, S. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Karim. (2012). *Ekonomi Makro Islam*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kemensos, R. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. (2011). *Pelayanan Publik*.
- Kominfo. (2018). *Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat*.
- Kuntjorowati, E. (2018). *Pengaruh Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan melalui Family Development Session*. 17 Nomor 2, 89–100.
- Lestari, R. W., & Talkah, A. (2020). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Pkh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pkh Di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* , 9(2), 229–241.
- Moenir. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara.

- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Kencana.
- Muharrir, R. H. (2021). Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dan Blt Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Kecamatan Air Kumbang Manfaat (Kpm) Di Desa Tirta Makmur. *Ntegritas Jurnal Manajemen Profesional (IJMPro)*, 2(X), 137–154.
- Novia Suci , Rian Destiningsih, Y. S. (2021). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Magelang Tahun 2020. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(1), 278–291.
- Nurma Mustika, Nurhadji Nugraha, dan I. D. (2019). Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2). <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/article/view/5917/2555>
- Oktavia, A. S. (2019). Survei Tingkat Kepuasan Peserta Program Kota Balikpapan. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(2), 1–13.
- Pasalong. (2011). *Teori Adminidtrasi Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan. (2004). *Indeks Kepuasan Masyarakat*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2018). *Program Keluarga Harapan. Menteri Sosial Republik Indonesia*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, P. (2013). *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, P. (2019). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.

- Ramadhan, A. (2022, October 25). Kepuasan Program Bansos di Bidang Kesejahteraan Sosial Meningkatkan. *Kompas*.
- Saputra, J. (2019, November 16). Tantangan Pendidikan di Sumatera Utara. *BPS*.
- Sarjono dan Julianita. (2013). *SPSS VS LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Salemba Empat.
- Silvia, L. P. (2021). ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SELAMA PANDEMI COVID-19 DESA/GAMPONG UJUNNG KALAK, KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT. *Uin Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Syarif, A. (2022). Analisis Pelayanan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Pertanian di Kab. Pengaruh Program Keluarga harapan dan kartu prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perfektif Islam (Studi Kasus Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 170–181.
- Tafsir, A. (2007). *Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Umi Kalsum, N. U. dan H. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamansari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(6).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

1. Identitas responden

Berikan tanda ceklis pada jawaban yang dipilih pada kolom jawaban yang telah disediakan.

- 1) Nama :
- 2) Jenis kelamin :
- 3) Usia :
- 4) Pekerjaan :
- 5) Pendapatan kepala keluarga per bulan :

Rp500.000 – Rp1.000.000

Rp1.000.000 – Rp1.500.000

Rp1.500.000 – Rp2.000.000

2. Petunjuk Penelitian

Bacalah dengan teliti setiap pernyataan dan pilihlah satu jawaban dari pernyataan berikut ini sesuai dengan kenyataan kehidupan sehari-hari bapak/ ibu, dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang sudah disediakan dengan keterangan adalah sebagai berikut ;

Keterangan	Singkatan	Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Kurang Setuju	KS	3
Tidak	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Pertanyaan-pertanyaan kuesioner

1. Kepuasan Layanan (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Penerima puas atas layanan bantuan sosial PKH yang diberikan					
2.	Dengan adanya bantuan sosial dapat membantu sebagian pendapatan keluarga					
3.	Dengan adanya bantuan program keluarga indonesia pintar dapat membantu pendidikan anak ibu					
4.	Penerima merasa puas dengan fasilitas pendidikan					

2. Program Layanan Publik (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1	Dengan adanya program keluarga harapan penerima menyadari akan pentingnya pendidikan					
2	Bantuan sosial PKH selalu tepat waktu diberikan.					
3	Jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan untuk kompensasi keluarga					
4	Bantuan PKH digunakan seluruhnya untuk biaya pendidikan anak ibu.					
5	Setelah mendapatkan bantuan PKH anak-anak ibu dapat bersekolah dan kehadirannya harus lebih dari 80% .					

3. Kemanfaatan Layanan Publik (X3)

No	Keterangan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Penerima dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sebaik-baiknya.					
2.	Penerima memanfaatkan bantuan sosial PKH untuk kebutuhan pendidikan.					
3.	Bantuan sosial PKH dapat memberikan manfaat bagi peneriman.					
4	Bantuan sosial PKH digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah (bukan untuk kepentingan pribadi)					

4. Kemaslahatan Masyarakat Dalam Kualitas Pendidikan (Y)

No	Keterangan	SS	S	KS	TS	STS
1	Semua anak wajib belajar selama 12 tahun di sekolah					
2	Dengan adanya bantuan sosial PKH dapat memenuhi kebutuhan sekolah anak					
3	Pendidikan anak terpenuhi tanpa adanya putus sekolah					
4	Dengan adanya bantuan sosial PKH sebagian kebutuhan pokok dapat terpenuhi					
5	Penerima PKH memiliki tempat tinggal yang layak untuk dihuni					

5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	2	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5
4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
4	5	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	2	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4
5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4
5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5
5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5

4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5
4	4	5	5	5	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3
5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5
4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	3
4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3
4	4	3	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



Lampiran 3 Data Responden

JENIS KELAMIN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	21	32.3	32.3	32.3
	Wanita	44	67.7	67.7	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

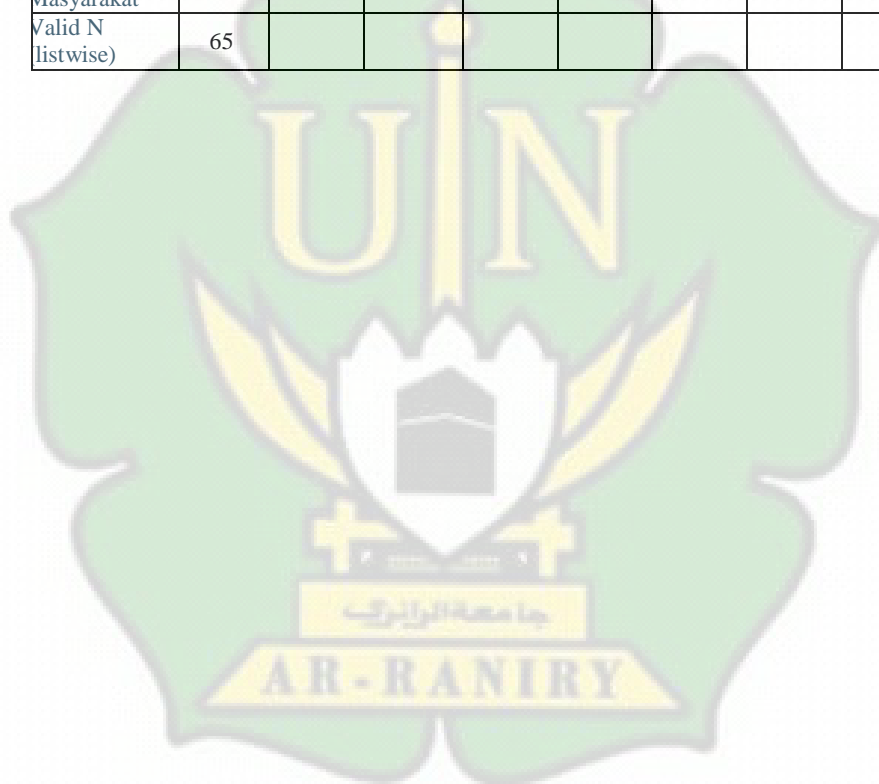
USIA					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31-40	21	32.3	32.3	32.3
	41-50	29	44.6	44.6	76.9
	51-60	15	23.1	23.1	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

PEKERJAAN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Petani	20	30.8	30.8	30.8
	Irt	40	61.5	61.5	92.3
	Pedagang	5	7.7	7.7	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

PENDAPATAN PERBULAN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp500.000-Rp1.000.000	39	60.0	60.0	60.0
	Rp1.000.000-Rp1.500.000	18	27.7	27.7	87.7
	Rp1.500.000-Rp2.000.000	8	12.3	12.3	100.0
	Total	65	100.0	100.0	

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics								
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Kepuasan Layanan	65	5.00	15.00	20.00	17.6000	.18579	1.49792	2.244
Pelayanan Publik	65	7.00	18.00	25.00	21.2769	.22629	1.82438	3.328
Kemanfaatan Layanan	65	4.00	16.00	20.00	17.7692	.19460	1.56893	2.462
Kemaslahatan Masyarakat	65	7.00	18.00	25.00	22.0615	.22984	1.85301	3.434
Valid N (listwise)	65							



Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data

A. Hasil Reliabilitas dan Uji Validitas

1. Kepuasan Layanan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.673	4

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Kepuasan Layanan
X1.1	Pearson Correlation	1	.312*	.474**	.416**	.762**
	Sig. (2-tailed)		.011	.000	.001	.000
	N	65	65	65	65	65
X1.2	Pearson Correlation	.312*	1	.253*	.257*	.657**
	Sig. (2-tailed)	.011		.042	.039	.000
	N	65	65	65	65	65
X1.3	Pearson Correlation	.474**	.253*	1	.355**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042		.004	.000
	N	65	65	65	65	65
X1.4	Pearson Correlation	.416**	.257*	.355**	1	.700**
	Sig. (2-tailed)	.001	.039	.004		.000
	N	65	65	65	65	65
Kepuasan Layanan	Pearson Correlation	.762**	.657**	.732**	.700**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

2. Program Layanan Publik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.637	5

Correlations							
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Pelayanan Publik
X2.1	Pearson Correlation	1	.252*	.444**	.275*	.387**	.683**
	Sig. (2-tailed)		.043	.000	.027	.001	.000
	N	65	65	65	65	65	65
X2.2	Pearson Correlation	.252*	1	.322**	.102	.165	.673**
	Sig. (2-tailed)	.043		.009	.417	.190	.000
	N	65	65	65	65	65	65
X2.3	Pearson Correlation	.444**	.322**	1	.433**	.259*	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009		.000	.037	.000
	N	65	65	65	65	65	65
X2.4	Pearson Correlation	.275*	.102	.433**	1	.276*	.580**
	Sig. (2-tailed)	.027	.417	.000		.026	.000
	N	65	65	65	65	65	65
X2.5	Pearson Correlation	.387**	.165	.259*	.276*	1	.593**
	Sig. (2-tailed)	.001	.190	.037	.026		.000
	N	65	65	65	65	65	65
Pelayanan Publik	Pearson Correlation	.683**	.673**	.728**	.580**	.593**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65	65
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							

3. Kemanfaatan Layanan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.797	4

Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Kemanfaatan Layanan
X3.1	Pearson Correlation	1	.654**	.438**	.452**	.808**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	65	65	65	65	65
X3.2	Pearson Correlation	.654**	1	.516**	.378**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.000
	N	65	65	65	65	65
X3.3	Pearson Correlation	.438**	.516**	1	.537**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	65	65	65	65	65
X3.4	Pearson Correlation	.452**	.378**	.537**	1	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000
	N	65	65	65	65	65
Kemanfaatan in Layanan	Pearson Correlation	.808**	.807**	.787**	.752**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Kemaslahatan Masyarakat

Reliability Statistics							
Cronbach's Alpha		N of Items					
.685		5					
Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Kemaslahatan Masyarakat
Y1	Pearson Correlation	1	.389**	.234	.080	.238	.546**
	Sig. (2-tailed)		.001	.060	.527	.057	.000
	N	65	65	65	65	65	65
Y2	Pearson Correlation	.389**	1	.378**	.211	.225	.624**
	Sig. (2-tailed)	.001		.002	.092	.072	.000
	N	65	65	65	65	65	65
Y3	Pearson Correlation	.234	.378**	1	.511**	.319**	.707**
	Sig. (2-tailed)	.060	.002		.000	.009	.000
	N	65	65	65	65	65	65
Y4	Pearson Correlation	.080	.211	.511**	1	.502**	.708**
	Sig. (2-tailed)	.527	.092	.000		.000	.000
	N	65	65	65	65	65	65
Y5	Pearson Correlation	.238	.225	.319**	.502**	1	.744**
	Sig. (2-tailed)	.057	.072	.009	.000		.000
	N	65	65	65	65	65	65
Kemaslahatan Masyarakat	Pearson Correlation	.546**	.624**	.707**	.708**	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	65	65	65	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikonearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.530	3.007		1.839	.071	
	Kepuasan Layanan	.269	.163	.218	1.652	.104	.625
	Pelayanan Publik	.166	.141	.164	1.180	.242	.563
	Kemanfaatan Layanan	.465	.131	.393	3.537	.001	.876

a. Dependent Variable: Kemaslahatan Masyarakat

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50691204
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.053
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.775	1.724		1.030	.307
	Kepuasan Layanan	.084	.093	.145	.904	.369
	Program Layanan	-.077	.081	-.162	-.959	.341
	Kemanfaatan Layanan	-.022	.075	-.040	-.295	.769

C. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.530	3.007		1.839	.071		
Kepuasan Layanan	.269	.163	.218	1.652	.104	.625	1.599
Pelayanan Publik	.166	.141	.164	1.180	.242	.563	1.775
Kemanfaatan Layanan	.465	.131	.393	3.537	.001	.876	1.141

a. Dependent Variable: Kemaslahatan Masyarakat

D. Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.530	3.007		1.839	.071		
Kepuasan Layanan	.269	.163	.218	1.652	.104	.625	1.599
Pelayanan Publik	.166	.141	.164	1.180	.242	.563	1.775
Kemanfaatan Layanan	.465	.131	.393	3.537	.001	.876	1.141

a. Dependent Variable: Kemaslahatan Masyarakat

E. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74.424	3	24.808	10.413	.000^b
	Residual	145.330	61	2.382		
	Total	219.754	64			

a. Dependent Variable: Kemaslahatan Masyarakat
b. Predictors: (Constant), Kemanfaatan Layanan, Kepuasan Layanan, Pelayanan Publik

F. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.582 ^a	.339	.306	1.54352

a. Predictors: (Constant), Kemanfaatan Layanan, Kepuasan Layanan, Pelayanan Publik
b. Dependent Variable: Kemaslahatan Masyarakat